

**PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MAKASSAR  
(Suatu Tinjauan Terhadap Hukum Islam)**



**Tesis**

Diajukan Untuk *Memenuhi* Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Pada Konsentrasi Hukum Syariah pada  
Pascasarjana UIN Alauddin  
Makassar

**Oleh:**

**LA DALLE  
NIM: 80201214016**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : La Dalle  
NIM : 80201214016  
Tempat/Tgl. Lahir : Sidrap/19 Agustus 1971  
Jurusan/Konsentrasi: Hukum Syariah  
Alamat : Jl. A.P. Pettarani 2 Ir. 4 No. 5  
Judul Tesis : Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar  
(Suatu Tinjauan Terhadap Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Februari 2017

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
La Dalle  
NIM: 80201214016



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد،

Puji syukur ke hadirat Allah swt. karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, petunjuk, dan pertolongan-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak, moral maupun material. Untuk maksud tersebut, maka pada kesempatan ini, sepatutnya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si., Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Mardan, M. Ag., wakil Rektor I UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A., wakil Rektor II, Prof. Dr. Hj. Aisyah Kara, M.A., Ph.D., wakil Rektor III, dan Prof. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D., wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar yang berusaha mengembangkan dan menjadikan kampus UIN sebagai kampus yang berperadaban.
2. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag., Prof. Dr. H. Ahmad Abu Bakar, M.Ag., wakil Direktur I, Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M. Ag., wakil Direktur II, Prof. Dr. Hj. Mulyaty Amin, M.Ag., wakil Direktur III Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, yang telah bersungguh-sungguh mengabdikan ilmunya demi peningkatan kualitas

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sebagai perguruan tinggi yang terdepan dalam membangun peradaban Islam.

3. Prof. Dr. Usman Jafar, M. Ag., dan Dr. Alimuddin, M. HI., selaku promotor dan kopromotor yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran berharga sehingga tulisan ini dapat terwujud.
4. Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag dan Dr. Kurniati, M. HI. selaku penguji yang arahan, dan saran-saran berharga sehingga tulisan ini dapat terwujud.
5. Istri tercinta Dra. Hj. Asiah yang telah memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian pendidikan magister.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian pendidikan magister.
7. Para Guru Besar dan segenap dosen Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu dan bimbingan ilmiahnya selama masa studi.
8. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Alauddin Makassar beserta segenap stafnya yang telah menyiapkan literatur dan memberikan kemudahan untuk dapat memanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian tesis ini.
9. Kepala BPJS Cabang Makassar dan jajarannya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak membantu kelancaran pelaksanaan penelitian dalam penyelesaian tesis ini.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian tesis ini.

Makassar, 23 Februari 2017

Penyusun,

La Dalle  
NIM: 80201214016

## DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PERSETUJUAN PROMOTOR.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	viii
TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK .....	xv
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1–15
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
 BAB II. TINJAUAN TEORETIS .....	 16-36
A. Tinjauan tentang BPJS Ketenagakerjaan.....	16
B. Jaminan Sosial .....	25
C. Hukum Islam dan Prinsip-Prinsip Sosial.....	27
D. Kerangka Konseptual .....	34
 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....	 38-45
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data .....	40
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
G. Pengujian Keabsahan Data.....	44
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 46-104
A. Gambaran Kota Makassar .....	46
B. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar.....	61
C. Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar .....	 83
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar .....	 93

BAB V. PENUTUP.....	105-107
A. Kesimpulan .....	105
B. Implikasi Penelitian .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	120



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### A. Daftar Tabel

	Hal
Tabel 1.1. Deskripsi Fokus .....	11
Tabel 3.1. Rincian Informan Penelitian.....	40
Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar (km <sup>2</sup> ).....	47
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Tahun 2016.....	48
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016 di Kota Makassar .....	50
Tabel 4.4. Jumlah Anak Usia 5-9 tahun dan Usia 10-14 Tahun Perkecamatan di Kota Makassar Tahun 2016.....	51
Tabel 4.5. Jumlah Murid TK, SD, SMP dan SMA di Makassar Tahun Ajar 2015/2016 .....	52

### B. Daftar Gambar

Gambar. 2.1 Bagan Kerangka Konseptual .....	37
Gambar. 4.1. Logo BPJS Ketenagakerjaan .....	54



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah danya'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

مَاتَ	: <i>mata</i>
رَمَى	: <i>rama</i>
قَيْلَ	: <i>qila</i>
يَمُوتُ	: <i>yamutu</i>

#### 4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *ˆ*~*sydid*(-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَم	: <i>nuˆˆima</i>
عُدُّوْ	: <i>ˆaduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf

*qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)  
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
 الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*  
 النَّوْءُ : *al-nau'*  
 شَيْءٌ : *syai'un*  
 أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi Zilal al-Qur'an*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

## 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *dinullah billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-*

*jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum firahmatillah*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalla'zi bi Bakkata mubranken*

*Syahrul Ramadan al-la'zi unzila fih al-Qur'an*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abual-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Ḥamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Ḥamid (bukan: Zaid, Nasr Ḥamid Abu)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>ṣallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
QS .../...: 4	= QS al- <i>Ẓariyat</i> /51: 56, QS al- <i>Hujurāt</i> /49: 13, QS al- <i>Ahzāb</i> /33:41, QS al- <i>Ra'd</i> /13: 28, QS al- <i>Imrān</i> /3:164, al- <i>Baqarah</i> /2:151
HR	= Hadis Riwayat
H	= Hijriah
M	= Masehi
TIU	= Tujuan Instruksional Umum
TIK	= Tujuan Instruksional Khusus



## PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “*Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar (Suatu Tinjauan Terhadap Hukum Islam)*” yang disusun oleh Saudara **La Dalle** NIM: 80201214016, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Selasa, 14 Februari 2017** Maschi, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awal 1438** Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Hukum Islam** pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

### PROMOTOR:

1. Prof. Dr. Usman Jafar, M. Ag (.....)

### KOPROMOTOR:

2. Dr. Alimuddin, M. HI. (.....)

### PENGUJI:

1. Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag (.....)

2. Dr. Kurniati, M. HI. (.....)

3. Prof. Dr. Usman Jafar, M. Ag (.....)

4. Dr. Alimuddin, M. HI. (.....)

Makassar, 23 Februari 2017

Diketahui oleh:

Direktur Pascasarjana

UIN Alauddin Makassar,

**Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag**

NIP. 19561231 198703 1 002

## ABSTRAK

Nama : La Dalle  
NIM : 80201214016  
Konsentrasi : Hukum Syariah  
Judul Tesis : Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar (Suatu Tinjauan Terhadap Hukum Islam)

---

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar ditinjau dari hukum Islam tujuan khusus, yaitu: 1) untuk mengetahui pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar, 2) untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Adapun sumber data penelitian ini adalah berbagai kepala bidang BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan, masyarakat dan ulama. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, pengamatan tuntas, dan dokumentasi. Lalu, teknik analisis data diolah melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraannya menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar, adanya *e-service* yang bisa dimanfaatkan oleh peserta, adanya *service blue print* untuk mempercepat pelayanan, adanya penambahan manfaat pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian serta ditambah program jaminan pensiun, adanya sosialisasi yang rutin dilakukan kepada peserta sebelum memulai pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta menambah kenyamanan peserta yang datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Persepsi masyarakat menggunakan indikator sebagai penilaian yaitu *Tangible, Reliability, Responsiveness, Confidence, dan Empaty* dirasakan oleh masyarakat baik. Pandangan Islam akan keberadaan BPJS Ketenagakerjaan terdapat pro dan kontra di antara ulama-ulama dan ormas-ormas Islam.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya Cabang Makassar lebih ditingkatkan lagi demi implikasi tolong-menolong. 2) Memberikan peluang yang lebih besar kepada perusahaan dalam tahap musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang kebijakan yang menyangkut penyelenggaraan jaminan sosial. 3) Meningkatkan pemeriksaan serta pengawasan yang lebih ketat kepada perusahaan yang belum menjadi peserta maupun yang belum membayar iuran bulanan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih baik lagi.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Hampir tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memprogramkan kemakmuran dalam bidang ekonomi bagi warga negaranya. Semua politisi menjadikan pemberantasan kemiskinan sebagai isu sentral, baik ketika masa kampanye, maupun sesudah menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan.<sup>1</sup> Dalam Islam, kemiskinan itu dapat mendekatkan kepada kekafiran, sehingga harus diusahakan untuk dlenyapkan, minimal dikurangi.

Sumber pokok dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah salah satunya zakat. Jika zakat dalam pemerintahan Islam dari Madinah ditandingkan dengan pajak di negara-negara lainnya, yang menjadi bagian dari salah satu sumber anggaran pendapatan negara, lalu penggunaan zakat yang menjadi perbandingan belanja negara, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Negara Madinah dengan mendasarkan pada QS al-Hajj/22:41. Ayat tersebut menjelaskan tentang zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Di dalam ayat tersebut menjelaskan delapan golongan yang berhak mendapat anggaran belanja negara, melalui zakat tersebut urutan terdepan ditempati orang-orang fakir, sesudah itu orang-orang miskin, dan seterusnya. Jadi, dalam APBN pemerintah Madinah pengentasan kefakiran dan kemiskinan termasuk dalam skala prioritas yang tinggi.

Selanjutnya, dalam pasal 15 Piagam Madinah atau ajaran Islam, menekankan jaminan atau perlindungan Allah Swt. terhadap orang-orang yang lemah, dan orang-orang Mukmin sebagian dari mereka wajib sebagai penolong dan pembela terhadap sebagian lainnya.

---

<sup>1</sup>Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam* (Yogyakarta:LKiS, 2010), h.237.

Terkait tentang jaminan atau perlindungan diri berdasarkan kajian Islam tersebut, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 Pasal 22 dan Pasal 25 juga menyatakan bahwa: *“Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan sosial: dalam hal menganggur, sakit, cacat tidak mampu bekerja, menjanda, hari tua.”*

Hukum Islam adalah ketentuan Allah swt yang berhubungan dengan segala perbuatan orang-orang *mukallaf* (yang dibebankan hukum). Baik ketentuan itu berupa *thalaban* (ketentuan untuk melakukan dan meninggalkan), *takhyiran* (memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wad'an* (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syah, syarat, atau *mani'*/penghalang).<sup>2</sup> Ketentuan Allah swt ini pada awalnya hanya berlandaskan pada al-Qur'an dan Nabi, sehingga para sahabat tidak perlu bersusah payah untuk menyelesaikan suatu kasus. Karena semuanya dapat diselesaikan di hadapan Nabi Muhammad saw. Akan tetapi setelah sepeninggal Nabi saw., banyak kasus baru yang bermunculan dan membutuhkan penyelesaian. Sementara untuk menyelesaikan kasus-kasus baru menggunakan dalil al-Qur'an dan al-Hadits saja tidak cukup memadai. Sebab, di dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak menjelaskan secara rinci semua kasus yang dihadapi ummat muslim. Kondisi ini menuntut para sahabat untuk melakukan kajian sendiri tentang persoalan yang dihadapi dengan tetap berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-Hadits. Kajian yang dilakukan oleh para sahabat terus dilakukan oleh para *tabi'in* dan *tabi'it at-tabi'in*. Namun, karena sangat jauhnya masa yang memisahkan antara *tabi'in* dan Nabi saw., maka

---

<sup>2</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (al-Qahriah: Dar al-Qalam, 1978), h. 100.

pemahaman mereka tentang al-Qur'an dan al-Hadits kadangkala mengalami kekeliruan.<sup>3</sup>

Begitu juga seharusnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen, pasal 34 mengamanahkan kepada Negara untuk memberikan kesejahteraan sosial kepada warga Negaranya. Ayat (2) dari pasal tersebut berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Ayat ini mengandung arti bahwa Negara harus terus mengembangkan sistem jaminan sosial untuk warga Negaranya, terutama warga Negara yang lemah dan tidak mampu. Karena pada ayat sebelumnya, ayat (1) menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.<sup>4</sup>

Ayat 1, 2 dan 3 tersebut mewajibkan kepada Negara untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak bagi warga Negaranya. Hal ini disebabkan karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Negara membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang ini Negara memberikan jaminan kepada semua warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, dengan sistem dan prosedur yang telah ditentukan oleh Negara. Selanjutnya, untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, Negara memandang

---

<sup>3</sup>Muhammad Zamroni, “Ilhaq Konsep Bpjs Dengan *Al-Ta'min* Perspektif *Qiyas*”, Vol. 14, No. 2, (Desember 2015).

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *UUD '45 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)* (Karya Simpati Mandiri, t.th.), h.27.

<sup>5</sup>Selanjutnya disingkat UU SJSN.

perlu membentuk sebuah badan yang akan menjadi penyelenggara dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional tersebut agar apa yang menjadi harapan dan tujuan dari Undang-Undang tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Oleh karena itu, dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Negara membentuk sebuah badan yang dinamakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.<sup>6</sup> Badan ini dibentuk sebagai penyelenggara sekaligus pengawas dari pelaksanaan SJSN. Badan ini yang akan berhubungan langsung dengan warga Negara yang ikut serta sebagai peserta dari BPJS.

Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan sistem jaminan sosial agar dapat dirasakan seluruh elemen masyarakat di Indonesia diawali dengan lahirnya Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional ini. Setelah diresmikan menjadi Undang-Undang No.40

---

<sup>6</sup>Selanjutnya disingkat UU BPJS.

tentang SJSN pada tanggal 19 Oktober 2004, 4 bulan berselang UU SJSN kembali mendapatkan masalah dimana beberapa daerah di Indonesia datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta menguji UU SJSN terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. MK akhirnya menganulir 4 ayat dalam pasal 5 yang mengatur penetapan 4 BUMN tersebut dan memberi peluang bagi daerah untuk membentuk BPJS Daerah (BPJSD).

Keputusan MK ini semakin memperumit penyelenggaraan jaminan sosial di masa transisi dan pembangunan kelembagaan SJSN yang semula diatur dalam satu paket peraturan dalam UU SJSN, kini harus diatur dengan UU BPJS. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pun akhirnya baru terbentuk. Pemerintah secara resmi membentuk DJSN lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110 tahun 2008 tentang pengangkatan anggota DJSN pada tanggal 24 September 2008. Pembahasan RUU BPJS pun berjalan alot antara Tim Kerja Menko Kesra dan Tim Kerja Meneg BUMN, yang notabene keduanya adalah Pembantu Presiden, tidak mencapai titik temu. RUU BPJS tidak selesai dirumuskan hingga tenggat peralihan UU SJSN pada 19 Oktober 2009 terlewati. Kemudian pada tahun 2010 DPR mengambil alih perancangan RUU BPJS namun perdebatan konsep BPJS kembali muncul bahkan area perdebatan bertambah, selain bentuk badan hukum penentuan siapa BPJS dan berapa jumlah BPJS juga diperdebatkan DPR dan Pemerintah. Pada akhirnya pro dan kontra perancangan RUU BPJS berakhir pada 29 Oktober 2011 dimana DPR RI sepakat dan kemudian mengesahkannya menjadi Undang-Undang setelah melalui proses yang panjang.

Setelah disahkan oleh DPR RI, lahirlah Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk melaksanakan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). BPJS ini berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip

kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Pembentukan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia. Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini merupakan pelaksanaan dari pasal 5 ayat (1) dan pasal 52 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset, dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. Dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maka dibentuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah penyelenggara jaminan sosial.

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Dengan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap, serta diharapkan kesejahteraan akan meningkat secara merata di seluruh Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan program jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari

tua dan jaminan pensiun bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pekerja formal dan informal, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, penerima pensiunan pegawai negeri sipil dan TNI/POLRI dan badan usaha lainnya ataupun rakyat pada umumnya. Disamping itu, berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

Dengan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan ini untuk mencegah adanya pengeluaran yang tidak terduga apabila buruh mengalami kecelakaan kerja dan membutuhkan biaya operasi yang sangat tinggi. Hal ini akan berpengaruh pada penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan hidup pada umumnya. Begitu pula dengan resiko kematian yang dapat menyebabkan keluarga dari buruh kehilangan pendapatan secara permanen, sehingga akan menurunkan kesejahteraannya. Selain itu, resiko hari tua yang akan datang sehingga buruh dituntut untuk memiliki tabungan hari tua agar bisa menikmati masa tuanya dengan cerah sehingga tidak mengurangi kesejahteraannya ketika sudah tidak bekerja lagi.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan hasil transformasi dari PT Jamsostek yang sebelumnya menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. PT Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 dan PT Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi serta Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1995 tentang penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Semua asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) menjadi asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan dan semua pegawai PT Jamsostek menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya

tahap persiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi secara penuh yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Pada saat PT Jamsostek bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial strategi yang diterapkan untuk mencapai jumlah kepesertaan yang maksimal atau yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh yaitu dengan mendatangi setiap perusahaan yang belum terdaftar di PT Jamsostek yang dibantu serikat pekerja dan petugas pengawas dari dinas ketenagakerjaan yang akan mendatangi perusahaan itu agar segera menjadi peserta. Selain itu, PT Jamsostek juga memberikan surat peringatan kepada perusahaan tersebut agar segera menjadi peserta PT Jamsostek dan akan dikenakan sanksi berupa denda paling tinggi Rp 50.000.000 dan pidana penjara paling lama 8 bulan yang diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. PT Jamsostek pun hanya dibantu oleh dinas ketenagakerjaan sebagai pihak dari pemerintah untuk membantu menjalankan tugasnya tersebut.

Namun strategi ini tidak berjalan efektif karena pertumbuhan kepesertaan berjalan lambat karena PT Jamsostek harus mendatangi perusahaan satu per satu



tidak bisa langsung semua dicatat PT Jamsostek perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar ini.

Semenjak adanya perubahan nama dari JAMSOSTEK menjadi BPJS pada 1 Januari 2014, banyaknya masyarakat luas yang belum mengetahui dan belum paham tentang BPJS terutama BPJS Ketenagakerjaan. Sebagian besar kalangan atas sudah mengetahui tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi sebagian besar bagi kalangan menengah dan kebawah belum banyak mengetahui tentang BPJS Ketenagakerjaan. Dari hasil survey yang dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan sebagian besar yang mereka tahu yaitu BPJS adalah BPJS Kesehatan dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan.

Bahkan hampir 70 persen masyarakat hanya tahu tentang BPJS Kesehatan dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan yang hanya 30 persen masyarakat mengetahuinya. Karena BPJS Kesehatan lebih dahulu launching dibandingkan dengan BPJS Ketenagakerjaan tetapi informasi yang diberikan sebelumnya sudah dijelaskan secara langsung kepada masyarakat maupun dari media. BPJS ada dua yaitu BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu diperlukan peranan humas untuk memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang BPJS.

Seperti melakukan kegiatan sosialisasi, kampanye, atau kegiatan-kegiatan humas lainnya. Masyarakat untuk kalangan atas pada umumnya mengetahui informasi tersebut melalui media elektronik, online maupun cetak seperti surat kabar, majalah maupun koran. Tetapi dengan masyarakat kalangan menengah atau kalangan bawah sebagian besar belum banyak mengetahui tentang BPJS Ketenagakerjaan dari fungsi, kegunaan kartu peserta dan manfaat program yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena sebagian besar menganggap

Jamsostek hanya melakukan transformasi atau perubahan nama saja yang dilakukan. Dan masyarakat tidak mengetahui bahwa BPJS menjadi dua bagian yaitu ketenagakerjaan dengan kesehatan. Bahkan faktanya saat ini masyarakat masih banyak mengurus klaim kesehatan di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, diperlukan suatu pemahaman masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan terhadap jaminan sosial yang telah diundangkan dalam Undang-undang BPJS tersebut dengan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul **“Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar (Suatu Tinjauan Hukum Islam)”**.

## ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian***

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan suatu tinjauan hukum Islam”. Untuk lebih memperjelas pemahaman terhadap hal-hal yang dibahas, perlu dijelaskan beberapa istilah dalam fokus penelitian ini, agar dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif, utuh dan bermakna.

Adapun istilah dalam fokus penelitian yang perlu dipertegas dalam penjelasan sebagai patokan adalah: Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan suatu tinjauan hukum Islam.

### **2. Deskripsi Fokus Penelitian**

Deskripsi fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Deskripsi fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Deskripsi fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah.

- a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
- b. BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme jaminan sosial.
- c. Hukum Islam ialah doktrin (kitab) *syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir).

Adapun deskripsi Fokus Penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Tabel Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar	1. Jaminan Pensiun 2. Jaminan Kecelakaan Kerja 3. Jaminan Kematian 4. Jaminan Hari Tua
Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar	1. <i>Angible</i> 2. <i>Reliability</i> 3. <i>Responsiveness</i> 4. <i>Confidence</i> . 5. <i>Empaty</i> .
Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar	Perbuatan orang-orang yang bersangkutan dengan perbuatan secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir).

### ***C. Rumusan Masalah***

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar ditinjau dari hukum Islam. Yang menjadi sub masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar?

### ***D. Kajian Penelitian Terdahulu***

Dalam kajian telaah pustaka yang penyusun lakukan, tidak sedikit pembahasan mengenai program BPJS, dalam bentuk artikel, buku, tesis serta makalah-makalah.

Jurnal yang ditulis oleh Elias Samba Rufus “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) di Yogyakarta”. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) belum terlaksana dengan baik karena, dalam pembayaran iuran Jaminan Hari Tua PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) seringkali mengalami keterlambatan pembayaran, berdasarkan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua menyebutkan “pemberi kerja wajib membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan dirinya”, dan apabila iuran untuk Jaminan Hari Tua mengalami keterlambatan dalam pembayarannya

sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua maka pemberi kerja akan dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan.

Jurnal yang ditulis oleh Triyono & Soewartoyo “Kendala Kepesertaan Program Jaminan Sosial Terhadap Pekerja di Sektor Informal: Studi Kasus di Kota Surabaya”. Disimpulkan bahwa Mayoritas pekerja informal belum tersentuh dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini bukan saja diakibatkan kurangnya program penyelenggara tetapi berbagai kendala sosial yang berasal dari dalam karakteristik pekerja sendiri. Faktor *indown* seperti rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan pengetahuan sebagai aspek penting.

Tesis yang ditulis oleh Ahmad Ansyori “Analisis terhadap Tujuan Pendirian BUMN Persero dalam Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)”.

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Zamroni “Ilhaq Konsep BPJS dengan *al-ta'min* perspektif Qiyas”. Hasil penelitian disimpulkan bahwa BPJS dalam hukum Islam hanya memperbolehkan BPJS yang memiliki prinsip saling tolong menolong, yakni prinsip saling membantu (bekerjasama), melindungi, bertanggung jawab dan menghilangkan unsur *garar*. Empat prinsip ini lebih menggambarkan nuansa sosial dari pada ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Sehingga BPJS ini sama persis seperti praktik *ta'min ta'awun*, yaitu usaha kerjasama dan solidaritas yang tidak bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi hanya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh salah satu anggota asuransi. Sehingga BPJS hukumnya boleh dengan melihat anggota BPJS sebagai *mutabarri'* dengan syarat tidak ada unsur sangsi karena adanya keterlambatan pembayaran premi.

Dari hasil penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan, baik berbentuk Thesis, artikel, makalah dan buku, penyusun belum menemukan hasil penelitian tentang pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dalam tinjauan hukum Islam. Menurut penulis hal ini perlu untuk dilakukan penelitian agar mengetahui bagaimana landasan hukum Islam terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Hasilnya diharapkan dapat memberi masukan yang positif bagi kita semua khususnya bagi pelaku BPJS dan masyarakat secara umum.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar dalam tinjauan hukum Islam. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar.
- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar.

##### **2. Kegunaan penelitian**

###### **a. Kegunaan Ilmiah**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan menambah hasanah pengetahuan, dan dapat menambah hasanah pemikiran dan pemahaman terkini yang berhubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Hukum Islam.

###### **b. Kegunaan Praktis**

Dapat memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran tentang konsep

BPJS Ketenagakerjaan. Memberikan pandangan dan menambah wacana baru bagi masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga ajaran-ajaran tetap mempunyai makna di era modern ini khususnya terhadap BPJS Ketenagakerjaan.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### ***A. Tinjauan tentang BPJS Ketenagakerjaan***

##### **1. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu program yang bila mengacu pada UU No. 4 Tahun 2014 diselenggarakan oleh pemerintah yang bergerak di bidang jaminan sosial yang bertujuan untuk menjamin dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat terkait dalam hal jaminan sosial.

Beberapa definisi tentang BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a. Merupakan program pemerintah yang menitikberatkan pada pelayanan jaminan sosial terkhusus kepada tenaga kerja atau pegawai baik pegawai negeri maupun swasta.<sup>7</sup>
- b. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden di mana BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. Perlindungan yang diberikan berupa: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
- c. Khusus pada jaminan Pensiun (JP) baru berlaku mulai Juli 2015.<sup>8</sup>
- d. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan adalah pengganti PT. Jamsostek.

---

<sup>7</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Mataram: Rajawali Pers, 2007). h. 33.

<sup>8</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, h. 34.



- e. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah program SJSN yang dikhususkan untuk pelayanan bagi tenaga kerja atau karyawan dalam bentuk jaminan hari tua. Jadi intinya BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan fokus untuk jaminan pensiunan bagi para pekerja atau karyawan.<sup>9</sup>
- f. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan adalah program khusus untuk tenaga kerja atau pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta.<sup>10</sup>

Dengan pengertian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan terhadap jaminan hari tua bagi pekerja atau pegawai negeri maupun swasta atau pemegang kartu jamsostek yang lama. Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Adapun fungsi BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, BPJS bertugas untuk melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial, memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 61- 62.

<sup>10</sup> Manulang, Sendjun, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta, 1990), h. 23.

<sup>11</sup> Manulang, Sendjun, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, h. 23.

Dalam melaksanakan tugasnya maka BPJS Ketenagakerjaan berwenang untuk menagih pembayaran iuran, menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional, mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya, melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.<sup>12</sup>

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana yang telah disebutkan maka BPJS berhak untuk memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) setiap 6 bulan.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya BPJS berkewajiban untuk memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta, mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta, memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya, memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan

---

<sup>12</sup> G Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, (Bandung: Armico Bandung, 1982), h. 43-44.

<sup>13</sup> Wiwiho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja* (Jakarta: Bina Aksara, 2000) h. 41.

Sosial Nasional, memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku, memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya, memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 kali dalam 1 tahun, memberikan informasi kepada peserta mengenai besaran hak pensiun 1 kali dalam 1 tahun, melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.<sup>14</sup>

Ruang lingkup dari BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja.<sup>15</sup>

Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha. Selain itu, ada jaminan hari tua yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip jaminan sosial atau tabungan wajib. Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang

---

<sup>14</sup> Zainal Asikin et.al, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 97.

<sup>15</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 1985), h. 31-37.

tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. Iuran untuk jaminan hari tua ditanggung perusahaan sebesar 3,7% dan tenaga kerja sebesar 2%.<sup>16</sup>

Kemudian ada jaminan kematian yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 21.000.000,- terdiri dari Rp 14.200.000,- santunan kematian dan Rp 2.000.000 juta biaya pemakaman dan santunan berkala Rp 200.000 per bulan selama 24 bulan. Selain itu, ada jaminan pensiun yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan oleh peserta.<sup>17</sup>

## **2. Fungsi dan Tujuan BPJS Ketenagakerjaan**

Mengenai tugas dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS terdapat pada pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 antara lain sebagai berikut, yaitu :

---

<sup>16</sup>Zaeni Asyhadic, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, h. 12.

<sup>17</sup>Zaeni Asyhadic, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, h. 13.

a. Tugas BPJS :

- 1) Melakukan dan menerima pendaftaran dari calon peserta
- 2) Mengumpulkan dan mengelola data peserta
- 3) Menerima bantuan iuran dari pemerintah
- 4) Memungut dan mengumpulkan iuran peserta dan pemberi kerja
- 5) Memberikan informasi kepada peserta
- 6) Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
- 7) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial<sup>18</sup>

b. Wewenang BPJS :

- 1) Menagih pembayaran iuran kepada setiap perusahaan yang mendaftarkan pegawai/karyawan sebagai peserta BPJS
- 2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya serta mengenakan sanksi administratif kepada peserta
- 3) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah
- 4) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial
- 5) Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam memenuhi kewajiban.<sup>19</sup>

Hubungan hukum antara peserta dan penyelenggara jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan) bisa dilihat dari mekanisme pendaftaran peserta yang dalam hal ini merupakan pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan di mana tempat

---

<sup>18</sup>Lalu, Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Cet. Ke-9; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 25.

<sup>19</sup>Lalu, Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, h. 25.

mereka bekerja. Perlu diketahui ada dua kelompok peserta BPJS jenis ini, yang pertama adalah Peserta Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja, sedangkan yang berikutnya Peserta Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja. Sesuai dengan jenisnya, BPJS dengan peserta tenaga kerja dalam hubungan kerja terdiri dari pekerja sektor formal dan yang non-mandiri (tergabung dalam perusahaan). Mereka yang masuk dalam peserta BPJS ini adalah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya disebut PNS), Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut TNI/POLRI), Pensiunan (PNS/TNI/POLRI), Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD), Pegawai Swasta, Yayasan, *Joint Venture*, Veteran, hingga Perintis Kemerdekaan. Nantinya pihak pemberi kerja akan mendaftarkan diri beserta para pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan.<sup>20</sup>

Melihat dengan dimilikinya 4 Program utama dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu : Jaminan Kecelakaan Kerja (yang selanjutnya disebut JKK), Jaminan Kematian (yang selanjutnya disebut JK), Jaminan Pensiun (yang selanjutnya disebut JP) dan Jaminan Hari Tua (yang selanjutnya disebut JHT). Maka seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah didaftarkan oleh masing-masing perusahaannya akan mendapatkan hubungan hukum berupa :

- a. Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja yaitu dengan diberikannya kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja atau karyawan yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali kerumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Manfaatnya, bila mendapat kecelakaan sedang bekerja, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti biaya transportasi, santunan, biaya pengobatan, santunan cacat dan santunan kematian. Dan ini merupakan sektor informal

---

<sup>20</sup>Sulastomo, *Mekanisme Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 12-14.

yang tidak mendapatkan upah atau gaji, seperti tukang ojek, pedagang, supir transpor dan lain – lainnya yang tidak mendapat gaji, dan ini juga termasuk disektor formal.

- b. Untuk manfaat Jaminan Kerja, diberikan kepada ahli waris tenaga kerja atau karyawan dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Jadi peserta yang meninggal mendapat santunan sebesar Rp14.2 juta ditambah biaya pemakaman Rp2 juta yang diterima ahli waris.
- c. Sedangkan, maksud dari manfaat Jaminan Hari Tua, diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua yang iurannya ditanggung oleh pekerja. Untuk Jaminan Hari Tua ini dibayarkan atau diambil sebesar iuran yang terkumpul selama menjadi peserta ditambah hasil pengembangan di atas bunga umum perbankan dan iuran yang dibayarkan tidak dikenai biaya administrasi potongan. Apabila ia telah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Bab IV Bagian keempat dijelaskan mengenai hak BPJS, yaitu :

- a. Hak BPJS diatur dalam pasal 12, Seperti berikut :

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU BPJS, BPJS berhak untuk :

- 1) Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- 2) Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) setiap 6 (enam) bulan.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Bab IV Bagian kelima dijelaskan mengenai kewajiban BPJS, yakni :

b. Kewajiban BPJS diatur dalam Pasal 13, Seperti berikut :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban untuk :

- 1) Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta,
- 2) Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta,
- 3) Memberikan informasi melalui media massa, cetak, dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya,
- 4) Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-undang Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
- 5) Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku,
- 6) Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya,
- 7) Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,
- 8) Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,
- 9) Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum,
- 10) Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial, dan
- 11) Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN



## B. *Jaminan Sosial*

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaraanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB) tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) tahun 1948 dan *konvensi International Labour Organisation* (yang selanjutnya disebut ILO) Nomor.102 tahun 1952.

Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.<sup>21</sup>

Sistem jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.<sup>22</sup>

Dasar hukum jaminan sosial antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5, Pasal 20, Pasal 28, dan Pasal 34.

---

<sup>21</sup> Wiwiho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja* (Jakarta: Bina Aksara, 2000), h. 41

<sup>22</sup> Zainal Asikin et.al, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 97.

- 2) Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948 dan Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952.
- 3) TAP MPR RI No X/MPR/2001 yang menegaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.<sup>23</sup>

## 2. Jenis-Jenis Jaminan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menyebutkan bahwa terdapat adanya 4 jenis jaminan sosial yaitu :

### a. Jaminan Sosial Kesehatan

Dalam hukum jaminan sosial, *evenemen* adalah peristiwa tidak pasti yang menjadi beban penanggungan. Dalam jaminan sosial kesehatan yang dimaksud dengan peristiwa tidak pasti adalah keadaan sakit yang mengancam kesehatan peserta. Apabila keadaan ini terjadi akan mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan karena pengeluaran biaya perawatan dan pengobatan. Resiko atas keadaan inilah yang menjadi beban jaminan Badan Penyelenggara sebagai penanggung. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Biaya pemeliharaan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan, dibayar berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan. Namun untuk semua biaya yang melebihi standar pelayanan dan tarif menjadi beban dan tanggungan jawab peserta.

---

<sup>23</sup>Neil Gilbert, *Transformation of the Welfare State : The Silent Surrender of Public Responsibility* (New York: Oxford University Press, 2002 hlm. 61-67.

b. Jaminan Sosial Pensiun dan Tabungan Hari Tua

Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tabungan hari tua adalah suatu program Jaminan sosial pegawai negeri sipil, terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.

c. Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja

Jaminan sosial ini memberikan kompensasi/santunan dan pengantian biaya perawatan bagi tenaga kerja yang mengalami kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, dimulai dari berangkat kerja sampai kembali ke rumah atau menderita sakit akibat hubungan kerja.

d. Jaminan Sosial Kematian

Jaminan sosial ini merupakan jaminan yang memberikan manfaat yaitu santunan kematian, biaya pemakaman, dan santunan berkala selama 24 Bulan. dan jaminan sosial ini memberikan pembayaran tunai kepada ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia.<sup>24</sup>

**C. *Hukum Islam dan Prinsip-Prinsip Sosial***

Secara etimologi, *Maqashid al-Syariah* berarti maksud/tujuan disyariatkan hukum Islam. Menurut istilah identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Menurut Wahbah al Zuhaili, *Maqasid al-Syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* dalam setiap ketentuan hukum.<sup>25</sup> Adapun yang menjadi bahasan utama *Maqashid al-syariah* adalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum.

<sup>24</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1985), h. 31-37.

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-fiqih al-Islam* (Damaskus: Dar al-Fikr. 1986), h. 1017.

Menurut al-Juwaini, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Menurut al-Ghazali, *mashlahah* adalah memelihara maksud *al-Syari'* (pembuat hukum).

Menurut Izzuddin bin Abd Salam, tujuan hukum adalah *dar'ul mafashid wa jalbul manafi'* (ada yang menyebut *mashalih*) yang artinya menghindari *mafsadat* dan menarik manfaat (kemaslahatan). Adapun kemaslahatan asasi bagi al Buthi, sebenarnya hanyalah satu yaitu terciptanya penghambaan seorang mukallaf kepada Allah dan *ma'rifat billah*. Al Buthi mendasarkan pada dalil QS al-Qaṣaṣ/28: 77. Al Buthi menandakan bahwa mayoritas ahli tafsir bersepakat bahwa pernyataan *la tansa nashibaka min al dunya*, bermakna bagian dunia yang berfaedah bagi akhiratnya.<sup>26</sup>

Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>27</sup> Imam Al-Syathiby telah melihat *maqashid al-syariah* dari dua sisi: "*wujud*" dan "*adam*" atau "*the presence and the absence*". Dalam bukunya Al-Muwafaqat beliau mengatakan bahwa: "Menjaga *maqashid al-syariah* harus dengan dua hal. Pertama, menegakkan pondasi dan tiangnya sebagai bentuk perhatian terhadap *al-wujud*. Kedua, menangkal kerusakan yang akan terjadi atau diperkirakan akan terjadi sebagai bentuk perhatian terhadap *al-'adam*". Hanya saja ide dasar ini masih memerlukan uraian, penjelasan dan penjabaran yang dapat menghubungkannya dengan realita kehidupan umat dari masa ke masa.

Di antara ulama yang melihat *maqashid al-syariah* dengan cara pandang "*double vision correlation*" adalah Imam Ibnu Taimiyah. Dalam pandangan

---

<sup>26</sup> Muhammad Said Romadlon al Buthi, *Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah* (Beirut: Dar al Muttahidah, 1992), h. 112.

<sup>27</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 225.

beliau membangun *al-wujud* adalah dasar, sedangkan menjaga *al-'adam* merupakan pelengkap. Sisi pertama adalah tujuan utama, sedangkan sisi kedua adalah tujuan pelengkap.<sup>28</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya *al-Syari'* menentukan suatu hukum syara' dengan maksud/tujuan untuk *maslahah* (kebaikan) manusia.

Ada tiga pendapat mengenai boleh tidaknya menta'ilkan hukum dengan mashlahat

- a. Menurut ulama Asy'ariyah dan Dzahiriyah, tidak boleh menta'ilkan hukum syara' dengan *maslahah*. Bagi mereka, premis ini mengimplikasikan bahwa diwajibkan karena pertimbangan *mashalah*, untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Karena kewajiban semacam itu berarti membatasi kemahakuasaan Tuhan, maka kaum Asy'ariah menolak ide bahwa mashlahah adalah '*Illal al Syar'i*'. Kendatipun demikian, mereka menerima premis ini dengan menafsirkan *mashlahah* sebagai 'rahmat' Tuhan, dibanding sebagai 'sebab' bagi tindakan-tindakanNya.
- b. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah, mashlahat bisa dijadikan illat sebagai hukum, suatu tanda saja bagi hukum, bukan sebagai penggerak yang menngerakkan Allah menetapkan hukum tersebut.
- c. Menurut Mu'tazilah, Maturidiyah, sebagian ulama Hambaliah dan semua ulama Malikiyah, segala hukum Allah dita'ilkan dengan *maslahah*, karena Allah telah berjanji senantiasa mencurahkan rahmat atas hamba-Nya, menolak kepicikan dan kesempitan. Mereka berkata bahwa segala hukum dita'ilkan dengan mashlahat tanpa mengaitkan iradat Allah dalam arti *ta'li* itu tidak boleh sampai melenyapkan faedah-faedah nash, karenanya jika

---

<sup>28</sup> Elly Warti Maliki. Antara Maqashid Syariah dan Karakter Umat. Retrived at Mei 2011 from <http://www.hidayatullah.com/>

belum Nampak kemashlahatan dalam pandangan kita, kita harus berkeyakinan bahwa hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan kita dan kita berhenti pada nash tersebut.<sup>29</sup>

As-Syathibi menyebutnya dengan istilah *Maqashid al-Khamsah*, jika dikorelasikan dengan peringkat asal hukum menurut al-Juwaini, maka bisa disusun sistematika berikut:

- a. *Hifdz ad-Din* (memelihara agama) memiliki tiga tingkatan
  - 1) *Dhoruriyat*, yaitu kebutuhan yang esensial bagi kehidupan manusia.  
Contoh: Menjalankan sholat lima waktu.
  - 2) *Hajjiyat*, yaitu Kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Contoh: Shalat Jama' Qashar.
  - 3) *Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatuhan. Contoh: menutup aurat.
- b. *Hifdz an-Nafs* (memelihara jiwa)
  - 1) *Dhoruriyat*, contoh: memakan bangkai dalam keadaan terpaksa.
  - 2) *Hajjiyat*, contoh: berburu, menikmati makanan halal dan lezat.
  - 3) *Tahsiniyat*, contoh: tata cara/ adab makan.
- c. *Hifdz al-Aql* (memelihara akal)
  - 1) *Dhoruriyat*, contoh: haramnya minuman keras.
  - 2) *Hajjiyat*, contoh: menuntut ilmu
  - 3) *Tahsiniyat*, contoh: menghindari mengkhayal/sesuatu yang tidak berfaedah.
- d. *Hifdz an-Nasl / an-Nasb* (memelihara keturunan)
  - 1) *Dhoruriyat*, contoh: disyariatkan nikah dan haramnya zina.

---

<sup>29</sup> Hasbi as-Siddieqy. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), h. 73.

2) *Hajjiyat*, contoh: menyebutkan mahar pada waktu aqad.

3) *Tahsiniyat*, contoh: khitbah dan walimah

e) *Hifdz al-Mal* (memelihara harta benda)

1) *Dhoruriyat*, contoh: disyariatkannya tata cara kepemilikan harta.

2) *Hajjiyat*, contoh: jual beli dengan cara salam.

3) *Tahsiniyat*, contoh: menghindari tindak penipuan.<sup>30</sup>

Tiga tingkatan di atas (*dhoruriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*) merupakan urutan hirarkis skala prioritas ketika terjadi benturan antara satu *masalah* dengan *masalah* yang lain. Misalnya, seseorang diperbolehkan memakan bangkai (makanan haram) ketika tidak dijumpai makanan yang lain dan jika ia tidak makan akan membahayakan nyawanya (*dhoruriyat* vs *hajjiyat*).

Syarat-syarat ditentukannya *maqashid*, yaitu tujuan tersebut menurut Wahbah az-Zuhaili harus:

1. Tetap (*tsabit*), yakni pasti tetap dalam hal hakikat maknanya atau prasangka yang dekat dengan kepastian arti.
2. Jelas (*dzahir*), yakni nyata dengan tanpa adanya pertentangan di kalangan fuqaha' mengenai pengkhususan makna. Contoh: maksud disyariatkannya nikah adalah untuk menjaga nasab. Ini adalah makna *dzahir*, tidak ada yang memakai serupanya dan ini menghasilkan
3. Kuat (*mundhabith*), yakni maknanya memiliki kekuatan atau membatasi selain yang diragukan padanya, sekiranya tidak memperbolehkannya atau tidak mengurangi daripadanya. Contoh: diharamkannya minuman keras dimaksudkan untuk menjaga akal, karena minuman keras menghilangkan kemampuan akal untuk berpikir.

---

<sup>30</sup> Majlis Tarjih Muhammadiyah

4. Umum (*mutharrid*), sekiranya makna bisa berubah berdasarkan perubahan waktu dan ruang.<sup>31</sup>

Menurut as-Syathibi, *maslahah* sebagai *maqasid syariah* harus mutlak dan universal. Kemutlakan berarti bahwa *mashlahah* tidak boleh subjektif dan relatif. Kenisbian biasanya didasarkan pada sikap menyamakan suatu masalah dengan salah satu dari kondisi kesenangan pribadi, keuntungan pribadi, pemenuhan keinginan nafsu dan kepentingan individu. Semua pertimbangan di atas memberikan konsep *maslahah* akan makna relatif dan subjektif, yang bukan merupakan pertimbangan *syari'* dalam *mashlahah*, meski mungkin dipertimbangkan dalam budaya adat.

Unsur universal dalam karakter di atas, tidak dipengaruhi oleh *takhalluf* (memperkecil) unsur-unsur partikularnya. Misalnya hukuman diberlakukan berdasarkan ketentuan universal bahwa biasanya hukuman ini mencegah orang dari melakukan kejahatan dengan mengabaikan orang-orang tertentu yang walaupun dihukum, tidak dapat menahan diri dari melakukan suatu kejahatan. Keberadaan orang-orang tertentu ini tidak mempengaruhi validitas ketentuan umum tentang hukuman.<sup>32</sup>

*Mashlahah* dalam bingkai pengertian yang membatasinya bukanlah dalil yang berdiri sendiri atas dalil-dalil *syara'* sebagaimana al-Qur'an, al-Hadits, *Ijma'* dan *Qiyas*. Dengan demikian tidaklah mungkin menentukan hukum parsial (*juz' il far'i*) dengan berdasar *kemashlahatan* saja. Sesungguhnya *mashlahah* adalah makna yang universal yang mencakup keseluruhan bagian-bagian hukum *far'i* yang diambil dari dalil-dalil atau dasar syariah.

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-fiqih al-Islam* (Damaskus: Dar al-Fikr. 1986), h. 1019.

<sup>32</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, h. 238.



Kesendirian *mashlahah* sebagai dalil hukum, tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna *mashlahah* dalam masalah-masalah *juz'i*. Hal ini disebabkan dua hal:<sup>33</sup>

1. Kalau akal mampu menangkap *Maqasid al-Syariah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya *syara'*. Hal ini mungkin menurut mayoritas ulama.
2. Kalau anggapan bahwa akal mampu menangkap *Maqasid al-Syariah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan *atsar* /efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi *mashlahah* bagi mayoritas akal manusia.

Bagi Abdul Wahhab Khallaf, *Maqasid al-Syariah* adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan al-Hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dari apa yang disampaikan Abdul Wahhab Khallaf ini, menunjukkan *Maqasid al-Syariah* tidaklah mandiri sebagai dalil hukum tetapi merupakan dasar bagi penetapan hukum melalui beberapa metode pengambilan hukum. Namun begitu, sebagaimana disinggung dalam pendahuluan hampir keseluruhan metode yang dipertentangkan/tidak disepakati oleh ulama, adalah karena faktor pengaruh teologi.<sup>34</sup>

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa *maqashid al-Syari'ah* adalah merupakan sebuah konsep yang sangat relevan dipergunakan oleh umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah hadits yang timbul akibat kemajuan ilmu

---

<sup>33</sup> Muhammad Said Romadlon al Buthi, *Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah*, h. 108.

<sup>34</sup> Abu Naqie Usamah. *Maqashid Syariah*. Retrived at May 2011 from <http://pesantren.or.id.42303.masterweb.net/>.

pengetahuan dan teknologi. *Maqasid Syari'ah* itu haruslah secara disiplin diketahui berdasarkan nash, bukan dari rekayasa akal, apalagi melalui manipulasi akal. Artinya membelokkan makna *Maqashid al-Syari'ah* untuk melegitimasi ide-ide Barat sekular, yang mentafsirkan menjaga agama (*hifzh al-din*) sebagai “perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan tujuan menjaga akal (*hifzh al-'aql*) diinterpretasikan sebagai “perlindungan terhadap kebebasan berpikir. Jadi, konsep maqashid al-Syari'ah telah dijadikan sekadar instrumen untuk menyusupkan ide-ide liberal yang sekular.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial, sehingga dengan adanya jaminan sosial, resiko keuangan yang dihadapi oleh seseorang, baik itu karena memasuki usia tidak produktif, mengalami sakit, mengalami kecelakaan dan bahkan kematian, akan di ambil alih oleh lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan fungsi BPJS dapat dilihat antara lain: Melakukan dan menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, Menerima bantuan iuran dari Pemerintah, mengelola dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial, membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial dan

memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat<sup>35</sup>

Dengan kata lain tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan data kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan iuran dari Pemerintah, pengelolaan Dana jaminan Sosial, pembayaran manfaat dan membiayai pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan keterbukaan informasi. Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara pasif dalam arti menerima pendaftaran atau secara aktif dalam arti mendaftarkan peserta.

Secara normatif agama Islam secara khusus al-Qur'an banyak memberi tuntunan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Beberapa prinsip yang diajarkan al-Qur'an untuk tujuan tersebut antara lain: Prinsip persatuan dan persaudaraan. Dalam ajaran Islam baik al-Qur'an banyak ditemukan petunjuk yang mendorong agar umat Islam memelihara persaudaraan dan persatuan di antara sesama warga masyarakat. Di antaranya adalah ayat tentang manusia itu adalah satu umat yang ditegaskan dalam QS al-Baqarah/2: 213. Prinsip persamaan seluruh umat manusia. Ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Nisā/4:1. Prinsip Kebebasan, ada beberapa jenis kebebasan yang diajarkan oleh Islam salah satunya adalah kebebasan untuk memeluk agama, Allah memberikan kebebasan beragama kepada setiap manusia untuk memeluk agama yang diyakini masing-masing. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam; QS al-Baqarah/2: 256, prinsip perdamaian. Dalam hal ini al-Qur'an memberi petunjuk seperti yang dipaparkan dalam QS al-Hujurat/49: 9-10, prinsip tolong-menolong. Manusia adalah makhluk sosial, dan tidak akan mungkin dapat

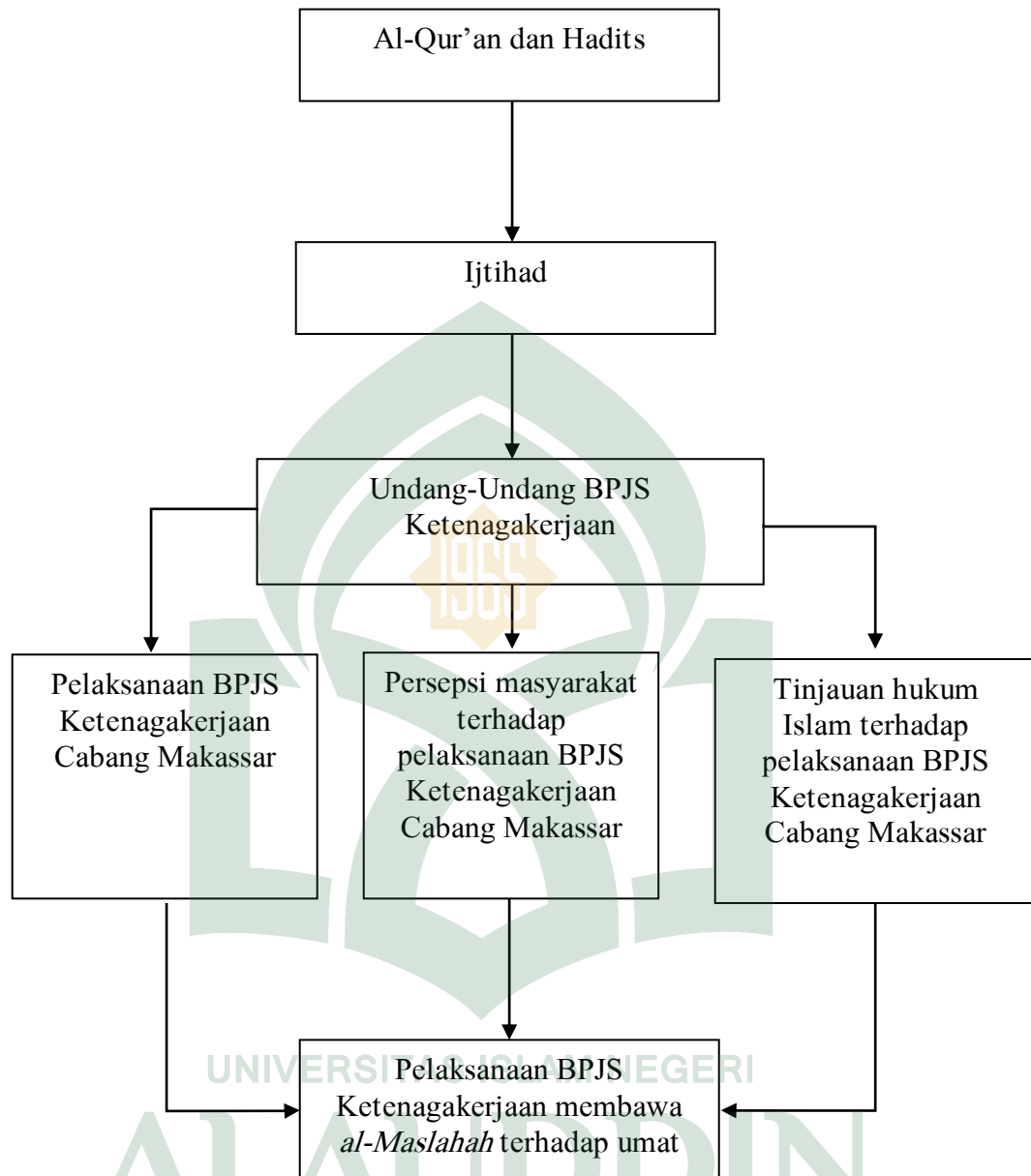
---

<sup>35</sup>(<http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/268>, diakses tanggal 19 September 2016 pukul 17.43).

hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Karena itu manusia diharapkan untuk bisa saling tolong-menolong untuk menajung kehidupan bermasyarakat, terutama tolong menolong dalam kebaikan. Hal ini ditegaskan dalam QS al-Mā'idah/5: 2, prinsip musyawarah. Dalam hal ini banyak sekali surat yang menjabarkan tentang Musyawarah QS al-Baqarah/2: 223, QS Ali'Imrān/3 :159, QS asy-Syūrā/42: 38.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 Tentang SJSN, Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal5 ayat (1)

Hal ini dapat dilihat pada bagan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar. 2.1. Bagan Kerangka Konseptual

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.<sup>36</sup> Penelitian deskriptif memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala sosial tertentu atau aspek kehidupan tertentu pada masyarakat yang diteliti. Pendekatan tersebut dapat mengungkapkan secara sistematis kaitan antara berbagai gejala sosial, suatu hal yang tidak dapat dicapai oleh penelitian yang bersifat menerangkan.<sup>37</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini memilih Kota Makassar sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa daerah ini di samping sebagai pusat konsentrasi pemerintahan kabupaten/kota dan juga sebagai pusat lowongan pekerjaan, sehingga dinamika di daerah ini semakin terasa meningkat.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan metode berpikir

---

<sup>36</sup> Sanapiyah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasinya*, cet. Pertama, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1989), h. 20

<sup>37</sup> Mukayat D. Brotowidjono, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karangan Ilmiah*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), h. 12.

berbasis filsafat yang dikenal dengan filsafat eksistensial.<sup>38</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memahami sebuah fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.

### C. *Sumber Data*

Sumber data adalah subyek penelitian dimana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua jenis data yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang utama atau data penting, biasa juga disebut data mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti.<sup>39</sup> Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan, Masyarakat dan Ulama.

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali

---

<sup>38</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, cet. Pertama, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001). h. 102.

<sup>39</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 122.

informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Adapun kriteria-kriteria penentuan Informan Kunci (*key informan*) yang tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rincian Informan Penelitian

No.	Kelompok Informan	Jumlah Informan
1	Kepala BPJS Ketenagakerjaan Makassar	1
2	Kabid Pelayanan	1
3	Kabid Keuangan	1
4	Kabid Umum dan SDM	1
5	Kabid Penerima Upah (PU)	1
6	Kabid Bukan Penerima Upah (BPU)	1
7	Perusahaan	6
8	Masyarakat umum	5
9	Ulama dan tokoh masyarakat	5
TOTAL		22 Orang

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, yang jenis data ini diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian, tetapi mengetahui bank syariah. Di sisi lain, data sekunder diperoleh dari referensi, baik berupa majalah, jurnal, buku-buku, maupun berbagai hasil penelitian yang relevan.

### D. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan masalah yang diteliti serta jenis data yang diperoleh, maka dalam penelitian ini akan digunakan sejumlah kombinasi metode dan tehnik pengumpulan data, yaitu:



- a) Observasi. Peneliti secara langsung terjun ke lapangan penelitian untuk melakukan wawancara petugas bagian BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar peneliti memiliki kedalaman dan ketajaman serta ketepatan analisis sehingga akurasi hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- b) Wawancara mendalam digunakan oleh peneliti terhadap 22 orang informan untuk mendapatkan klarifikasi mengenai pendapat-pendapat mereka tentang pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa rekaman video, tape recorder untuk pertanyaan bebas dan catatan manual serta untuk pertanyaan yang terstruktur.
- c) Dokumentasi dan Literatur. Merupakan pengumpulan data yang diambil baik dari dokumentasi instansi terkait maupun literatur yang ada di perpustakaan untuk memperkuat data lapangan.

Data yang diperoleh melalui wawancara di atas, merupakan data yang bersifat empiris, sedangkan data yang diperoleh dari literatur melalui perpustakaan yang ada kaitannya dengan obyek kajian, seperti teori-teori politik yang dibangun oleh para ahli merupakan data yang bersifat teori.

Data yang diperoleh, baik secara empiris maupun dari literatur merupakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui teori-teori yang dibangun oleh para ahli yang terhimpun dalam literatur serta sumber-sumber penerbitan lainnya dianggap sebagai data sekunder.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang amat penting dan strategis kedudukannya dalam keseluruhan kegiatan penelitian, karena data yang

diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian diperoleh melalui instrumen. Berikut ini instrumen yang peneliti gunakan, yaitu:

1. *Observasi.*

Ada dua jenis observasi, yaitu observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Observasi partisipatif yaitu pengamatan secara langsung, dalam hal ini peneliti menjadi anggota penuh dari kelompok yang diamati sehingga dapat memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan, termasuk yang dirahasiakan sekalipun. Observasi partisipatif tersebut difokuskan pada masalah yang menjadi perhatian penelitian atau yang sangat relevan dengan fokus penelitian. Di dalam melakukan observasi partisipatif peneliti menggunakan instrumen blangko dan catatan kecil.<sup>40</sup> Sedangkan observasi non partisipatif yaitu pengamatan yang dilakukan tidak secara langsung, dalam hal ini peneliti hanya melakukan pengamatan sekilas dan melakukan peninjauan lokasi ketika sewaktu-waktu membutuhkan beberapa data penting untuk diketahui.

2. *Interview* atau *wawancara.*

Terkait dengan itu, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang menyangkut deskripsi penelitian dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang memang diperlukan untuk melengkapi data-data yang sudah ada.

3. *Dokumentasi.*

Penerapan teknik dokumentasi dalam arti luas tidak hanya mengumpulkan arsip dan teori yang relevan, tetapi juga mencakup fakta atau realitas yang dapat diabadikan secara digital.

---

<sup>40</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 234.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder diolah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan penekanan *phenomenology* terhadap keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Dalam analisis kualitatif, fungsi paradigma dan teori itu bukan dalam rangka membentuk fakta, melakukan prediksi, menunjukkan hubungan dua variabel sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, melainkan lebih banyak untuk mengembangkan konsep dan untuk mengembangkan pemahaman terhadap gejala dan fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga menjadi jelas dan nyata.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data ini yaitu:

##### **1. Pengumpulan Data**

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara di lapangan.

##### **2. Reduksi Data**

Reduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu.

##### **3. Penyajian Data**

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matriks, networks, chart, atau grafis sehingga peneliti dapat menguasai data.

#### 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu, peneliti berusaha mencari pula model, tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering muncul. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

#### G. *Pengujian Keabsahan Data*

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan data (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut aliran “*postivisme*”. Dalam pandangan aliran *naturalistic* tidak menggunakan istilah tersebut akan tetapi Lincon dan Guba menyatakan bahwa dasar kepercayaan yang berbeda mengarah tuntutan pengetahuan (*knowledge*) dan Kriteria yang berbeda. Dalam pengecekan keabsahan data penulis menggunakan model triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi yaitu memanfaatkan sesuatu dari luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data.

Triangulasi ada dua macam, yaitu:

1. Triangulasi dengan sumber data yaitu mengumpulkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, cara yang ditempuh ialah dengan melakukan pengecekan data yaitu cara cek (*check*), cek ulang (*recheck*) dan cek silang (*cros check*).
  - a) Cek (*check*) artinya memberikan pertanyaan yang sama kepada informan.
  - b) Cek ulang (*recheck*) artinya mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan tetapi pada waktu yang lain/mengecek kembali.

- c) Cek silang (*cross check*) artinya membandingkan responden yang satu dengan yang lain kemudian diambil satu kesimpulan.

2. Triangulasi dengan metode:

- a) Membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan berikutnya.
- b) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- c) Membandingkan hasil wawancara pertama dengan wawancara berikutnya.



## BAB IV

### Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar Suatu Tinjauan Terhadap Hukum Islam

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Deskripsi Kota Makassar

###### a. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Kota Makassar adalah salah satu wilayah administratif yang setingkat dengan kabupaten di Sulawesi Selatan, terletak antara 119°24'17"38" Bujur Timur dan 5°8'6"19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km<sup>2</sup> yang meliputi 14 kecamatan, 143 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT.<sup>41</sup> Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas area adalah 48,22 km<sup>2</sup> atau 27,43 persen dari luas Kota Makassar. Berikutnya adalah Kecamatan Tamalanrea dengan luas wilayah sebesar 31,84 km<sup>2</sup> atau 18,11 persen dari luas Kota Makassar dan yang menempati urutan ketiga adalah Kecamatan Manggala 24,14 km<sup>2</sup> atau 13,73 persen dari luas Kota Makassar. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Mariso dengan luas wilayah sebesar 1,82 km<sup>2</sup> atau 1,04 persen dari luas Kota Makassar. Disusul dengan Kecamatan Wajo sebesar 1,99 km<sup>2</sup> atau 1,13 persen dari luas Kota Makassar yang menempati urutan luas wilayah terkecil kedua dan Kecamatan Bontoala terkecil ketiga dengan luas wilayah sebesar 2,10 km<sup>2</sup> atau 1,19 persen dari luas Kota Makassar.<sup>42</sup> Untuk memperjelas penjelasan diatas berikut adalah tabel berikut.

---

<sup>41</sup>Kota Makassar dalam Angka 2016, Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Katalog*.

<sup>42</sup> Kota Makassar dalam Angka 2016, Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Katalog*.

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut  
Kecamatan di Kota Makassar (km<sup>2</sup>)

Kode Wil	Kecamatan	Luas Area (Km2)	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar (%)
010	Mariso	1,82	1,04
020	Mamajang	2,25	1,28
030	Tamalate	20,21	11,50
031	Rappocini	9,23	5,25
040	Makassar	2,52	1,43
050	Ujung Pandang	2,63	1,50
060	Wajo	1,99	1,14
070	Bontoala	2,10	1,19
080	Ujung Tanah	5,94	3,38
090	Tallo	5,83	3,32
100	Panakkukang	17,05	9,70
101	Manggala	24,14	13,73
110	Biringkanaya	48,22	27,43
111	Tamalanrea	31,84	18,11
7371	Makassar	175,77	100

Sumber : Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar 2016

Penduduk kota Makassar tahun 2016 adalah sebesar 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 jiwa laki-laki dan 662.079 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga di Kota Makassar tahun 2009 mencapai 296.374 rumah tangga. Dengan Kecamatan Tamalate memiliki posisi nomor satu untuk jumlah penduduk terbesar di Kota Makassar yakni sebanyak 154.464 jiwa pada tahun 2009. Sementara Kecamatan Rappocini menempati posisi kedua dengan jumlah penduduk sebesar 145.090 jiwa pada tahun 2009, disusul oleh Kecamatan Tallo dengan jumlah penduduk sebesar 137.333 rumah tangga. Kecamatan yang memiliki jumlah rumah tangga terbesar di Kota Makassar adalah Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah rumah tangga sebesar 35.684 rumah tangga. disusul dengan Kecamatan Tallo dengan jumlah rumah tangga sebesar 35.618 rumah

tangga dan Kecamatan Tamalate terbesar ketiga dengan jumlah rumah tangga sebesar 32.904 rumah tangga. sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil dan jumlah rumah tangga terkecil adalah Kecamatan Ujung Pandang dengan jumlah penduduk adalah sebesar 29.064 jiwa dan jumlah rumah tangganya adalah sebesar 7.177 rumah tangga.

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Makassar yang paling tinggi untuk periode 2015-2016 adalah Kecamatan Biringkanaya dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,57 persen per tahun. Sedang kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk terkecil adalah Kecamatan Wajo dan Kecamatan Mamajang yakni sebesar 0,45 persen per tahun. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga di Kota Makassar.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Tahun 2016.

Kode Wil	Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2009	Rumah Tangga	Rata-rata Anggota Rumah Tangga
		2008	2009			
010	Mariso	54.616	55.431	0,93	13.401	4,14
020	Mamajang	60.395	61.294	0,45	16.294	3,76
030	Tamalate	152.197	154.464	2,08	32.904	4,69
031	Rappocini	142.958	145.090	1,62	28.444	5,10
040	Makassar	82.907	84.143	0,54	15.949	5,28
050	Ujung Pandang	28.637	29.064	0,51	7.177	4,05
060	Wajo	35.011	35.533	0,45	11.347	3,13
070	Bontoala	61.809	62.731	1,09	14.140	4,44
080	Ujung Tanah	48.382	49.103	1,21	11.331	4,33
090	Tallo	135.315	137.333	1,94	35.618	3,86
100	Panakkukang	134.548	136.555	1,09	26.929	5,07
101	Manggala	99.008	100.484	2,98	24.658	4,08
110	Biringkanaya	128.731	130.651	3,57	35.684	3,66
111	Tamalanrea	89.143	90.473	1,15	22.498	4,02

Sumber : Makassar dalam angka 2016



Persebaran penduduk antar kecamatan relatif tidak merata. Hal ini nampak dari tabel 4.3 dimana Kecamatan Tamalate yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Kota Makassar atau 12,14 persen dari total penduduk namun luas wilayahnya hanya meliputi sekitar 11,50 persen dari total luas wilayah Makassar. Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, nampak pada Tabel 4.3. bahwa Kecamatan Makassar yang memiliki kepadatan penduduk yang tertinggi yaitu 33.390 jiwa per km<sup>2</sup> sedangkan Kecamatan Biringkanaya memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 2.709 jiwa per km<sup>2</sup>.

b. Struktur Penduduk Menurut Umur

Struktur penduduk menurut umur merupakan faktor yang sangat penting dalam analisis potensi sumber daya manusia di suatu daerah. Hal tersebut karena dengan struktur penduduk menurut umur memberikan informasi mengenai potensi sumber daya manusia, tingkat ketergantungan penduduk menurut umur (*age dependency ratio*) serta berbagai karakteristik penduduk dan sumber daya manusia lainnya.

Pekerja anak dikategorikan dalam interval usia 7-14 tahun. Dalam Tabel 4.3 ditunjukkan bahwa struktur penduduk menurut umur di kota Makassar. Untuk melihat potensi sumber pekerja anak-anak maka kelompok penduduk usia muda (usia 0-14 tahun) dipecah menjadi dua kelompok yaitu kelompok usia balita (0-4 tahun) dan kelompok usia anak-anak (5-14 tahun). Berdasarkan pada Tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah balita (usia 0-4 tahun) di kota Makassar adalah 123.615 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 67.309 jiwa dan perempuan sebanyak 56.306 jiwa. Untuk usia anak-anak (5-14 tahun) adalah sebanyak 226,593.

Menurut Ghazy Farooq dan Yaw Otsu (1992) penduduk usia kerja atau tenaga kerja tersebut masih dapat dibedakan atas beberapa kelompok yaitu tenaga kerja yang baru memasuki usia kerja (*newly entering working age*) yaitu

termasuk dalam kelompok usia 15-24 tahun, kelompok usia kerja utama (*prime working age*) yaitu usia 25-54 tahun, kelompok usia mulai memasuki usia tua (*post working age*) yaitu kelompok usia 55-64 tahun dan kelompok usia tua (*old age*) yaitu usia 65 tahun ke atas. Pengelompokan tersebut didasarkan pada kemampuan fisik tenaga kerja untuk melakukan kegiatan ekonomi memproduksi barang dan jasa. Dimana tenaga kerja pada usia 15-25 tahun umumnya memiliki kemampuan produktifitas masih rendah sedangkan tenaga kerja pada usia 55-64 tahun tingkat produktivitasnya sudah mulai menurun.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016 di Kota Makassar

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	67.309	56.306	123.615
10 - 14	124.982	122.202	247.184
15 - 24	127.091	159.669	286.760
25 - 54	238.483	263.094	501.577
55 - 64	33.854	36.742	70.596
65+	18.551	24.066	42.617
Jumlah	610.270	662.079	1.272.349

Sumber : Makassar dalam angka 2016

Pada Tabel 4.3 nampak struktur penduduk tenaga kerja menurut umur di Kota Makassar. Persentase penduduk yang baru memasuki usia kerja atau *newly entering working age* (usia 15-24 tahun) di Kota Makassar yaitu sebesar 127.091 laki-laki dan 159.669 perempuan atau sebesar 22,54 persen dari total penduduk Kota Makassar. Sedangkan persentase penduduk yang termasuk dalam kelompok usia kerja utama atau *prime working age* (25-54 tahun) di Kota Makassar adalah sebesar 238.483 laki-laki dan 263.094 perempuan atau sebesar 39,42 persen dari total penduduk Kota Makassar. Selanjutnya proporsi penduduk lanjut usia (lansia) yaitu mereka yang telah berusia 65 tahun ke atas di Kota Makassar adalah sebesar 18.551 laki-laki dan 24.066 perempuan atau sebesar 3,35 persen dari total penduduk Kota Makassar.

Tabel 4.4. Jumlah Anak Usia 5-9 tahun dan Usia 10-14 Tahun Perkecamatan di  
Kota Makassar Tahun 2016

Kode Wilayah	Kecamatan	Usia 5-9		Usia 10-14		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
010	Mariso	2,719	2,485	2,362	2,429	9,995
020	Mamajang	2,653	2,454	2,495	2,420	10,022
030	Tamalate	7,322	6,987	6,773	6,714	27,796
031	Rappocini	6,068	6,276	6,168	6,497	25,009
040	Makassar	3,758	3,875	3,424	3,480	14,537
050	Ujung Pandang	1,151	1,002	1,107	972	4,232
060	Wajo	1,424	1,291	1,400	1,376	5,491
070	Bontoala	2,879	2,804	2,654	2,710	11,047
080	Ujung Tanah	2,682	2,674	2,618	2,470	10,444
090	Tallo	6,378	6,165	5,855	5,524	23,922
100	Panakkukang	5,907	5,728	5,668	5,481	22,784
101	Manggala	5,504	5,071	4,991	4,664	20,230
110	Biringkanaya	7,246	6,996	5,849	6,302	26,393
111	Tamalanrea	3,764	3,838	3,687	3,402	14,691

Sumber : Kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakkukang, Manggala, Biringkanaya, Tamalanrea, Dalam Angka, 2016.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai pekerja anak adalah yang berada dalam kelompok usia anak-anak, sehingga kecamatan yang memiliki proporsi jumlah anak terbesar untuk Kota Makassar berdasarkan pada Tabel 4.5 adalah Kecamatan Tamalate yaitu sebanyak 27.796 anak pada tahun 2016, kemudian disusul oleh Kecamatan Biringkanaya yaitu sebanyak 26.393 anak di tahun 2016, dan terbesar ketiga adalah Kecamatan Rappocini dengan jumlah anak-anak adalah 25.009 anak di tahun 2016.

c. Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagai pusat pelayanan pendidikan kota Makassar cukup banyak memiliki sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari tingkat Taman

Kanak-kanak sampai ke tingkat Perguruan Tinggi. Menurut data Statistik, pada tahun 2016, di kota Makassar terdapat sebanyak 333 sekolah Taman Kanak-Kanak. Demikian juga jumlah sekolah SD adalah sebanyak 459 sekolah. Prasarana pendidikan SLTP ada sebanyak 171 buah sekolah dan 112 sekolah SLTA. Sedangkan Perguruan tinggi terdiri dari 3 Universitas Negeri dan 1 Institut Negeri, untuk Perguruan Tinggi Swasta terdiri dari 14 Universitas, 26 Sekolah Tinggi, dan 16 Akademi.

Tabel 4.5. Jumlah Murid TK, SD, SMP dan SMA di Makassar Tahun Ajar 2015/2016

Pendidikan	Jumlah Murid
TK	13.934
SD	145.749
SMP	59.101
SMA	65.277

Sumber : Makassar Dalam Angka 2016

Pada Tabel 4.5. nampak bahwa jumlah murid TK (usia 4-5 tahun) di Kota Makassar pada tahun ajar 2015/2016 adalah 13.934 murid. Jumlah murid SD (usia 6-12 tahun) pada tahun ajar 2015/2016 adalah 145.749 murid. Sedangkan murid SMP (usia 13-15 tahun) di Kota Makassar adalah sebanyak 59.101 murid. Terakhir untuk jumlah murid SMA(usia 16-18 tahun) di kota Makassar adalah sebesar 65.277 murid.

## **2. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar**

### **a. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan cabang Makassar**

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program

jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja disektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya jaminan sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggaran ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibatrasi kesosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang

itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKJ, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, Jamsostek pun terus meningkatkan kompetensi diseluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Kini dengan system penyelenggaraan yang semakin maju, program Jamsostek tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.



Gambar. 4.1. Logo BPJS Ketenagakerjaan

### Arti Logo BPJS Ketenagakerjaan

#### HIJAU

1. Warna hijau melambangkan kesejahteraan.
2. Warna hijau diharapkan dapat merepresentasikan nilai-nilai pertumbuhan, harmoni, kesegaran, stabilitas dan keamanan.

#### PUTIH

1. Warna putih melambangkan integritas.
2. Warna putih diharapkan dapat merepresentasikan kemurnian, kebersihan dan kesempurnaan sebagai *symbol* kebaikan.

#### KUNING

1. Warna kuning melambangkan optimism.
2. Warna kuning diharapkan dapat merepresentasikan optimism, pencerahan dan kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik.

#### BIRU

1. Warna biru melambangkan keberlanjutan.
2. Warna biru diharapkan dapat merepresentasikan kepercayaan, kesetiaan, kebijaksanaan, kepercayaan diri, keahlian dan ketahanan jangka panjang.

#### b. Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar<sup>43</sup>

##### 1) Visi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar

Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

##### 2) Misi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:

---

<sup>43</sup> Buku Pedoman dan Informasi BPJS Ketenagakerjaan (tahun 2015-2016)

- a) Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga
- b) Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas
- c) Negara : Berperan serta dalam pembangunan.
- c. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan<sup>44</sup>

Sebagai program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas-tugas dan kejadian-kejadian untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab setiap anggota didalamnya, biasanya bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dalam suatu perusahaan yang menentukan bentuk organisasi adalah pimpinan yang bertujuan untuk mempermudah pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugas yang menentukan bagian-bagian pekerjaan serta merupakan suatu alat untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepada bawahan. Adapun struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar dapat dilihat pada lampiran.

---

<sup>44</sup> Buku Pedoman dan Informasi BPJS Ketenagakerjaan (tahun 2015-2016)



e. Job Description

Berikut ini adalah Job Description dari setiap bagian pada struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar yang terdiri dari :

1) Tugas Kepala Kantor Cabang<sup>45</sup>

Tugas dari Kepala Kantor Cabang ialah :

- a) Menyusun dan memantau implementasi rencana kerja dan anggaran tahunan Cabang kelas 1, guna menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya ;
- b) Mengendalikan kegiatan pengembangan kepesertaan formal dan informal selaras dengan kebijakan wilayah, guna memastikan tercapainya target pemasaran ;
- c) Memantau kegiatan pengelolaan peserta melalui program CRM di Cabang kelas 1, guna memastikan tercapainya target peningkatan iuran ;
- d) Mengarahkan pengelolaan program PKP selaras dengan kebijakan wilayah, guna memastikan program PKP mendukung efektivitas kegiatan pemasaran ;
- e) Mengarahkan dan memantau penyelenggaraan program manfaat dan kegiatan pelayanan, guna tercapainya kepuasan pelanggan ;

2) Tugas Kepala Pemasaran Informal Cabang<sup>46</sup>

- a) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidangnya;
- b) Menyusun program pemasaran (dalam rangka pengembangan kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan di kantor cabang selaras dengan strategi pemasaran wilayah, sebagai acuan kegiatan operasional.

---

<sup>45</sup> Buku Pedoman dan Informasi BPJS Ketenagakerjaan (tahun 2015-2016)

<sup>46</sup> Buku Pedoman dan Informasi BPJS Ketenagakerjaan (tahun 2015-2016)

- c) Mengkoordinasikan implementasi program pemasaran di bidang jasa konstruksi dan sektor informal serta memantau tingkat pencapaian, untuk memastikan target kepesertaan tercapai dengan efektif dan efisien ;
- d) Menerapkan program pengelolaan kepesertaan di cabang, untuk memberikan nilai tambah bagi peserta yang sudah terdaftar;
- e) Melakukan monitoring terhadap pelayanan administrasi kepesertaan dan penanganan keluhan, guna menjaga kepuasan peserta;

### 3) Tugas Kepala Pelayanan Cabang<sup>47</sup>

- a) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang Pelayanan, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidang Pelayanannya;
- b) Mengkoordinasikan proses Penetapan Jaminan, guna memperoleh besaran jaminan yang akurat ;
- c) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan bagi peserta, agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan ;
- d) Mengkoordinasikan penyelesaian keluhan peserta, guna meningkatkan kepuasan peserta ;
- e) Memantau kinerja petugas pelayanan (Customer Service), untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan yang telah ditetapkan ;
- f) Menyusun laporan kegiatan guna mendukung penyusunan laporan kegiatan cabang ;

### 4) Tugas Kepala Umum dan SDM Cabang<sup>48</sup>

- a) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang SDM & Umum, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidangnya ;

---

<sup>47</sup> Buku Pedoman dan Informasi BPJS Ketenagakerjaan (tahun 2015-2016)

<sup>48</sup> Buku Pedoman dan Informasi BPJS Ketenagakerjaan (tahun 2015-2016)

- b) Mengelola pemenuhan kebutuhan SDM, guna memastikan efektivitas penempatan di Cabang sesuai dengan spesifikasi jabatan ;
  - c) Mengelola kegiatan pengembangan kompetensi pegawai, untuk mendukung tercapainya standar kompetensi yang dipersyaratkan ;
  - d) Memantau kinerja dan mengelola hubungan industrial dilingkungan Kantor Cabang, guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif ;
  - e) Mengelola pemenuhan hak pegawai di Kantor Cabang dengan mengacu pada peraturan yang berlaku (antara lain gaji, fasilitas kesehatan, asuransi, dll), sehingga hak dapat diberikan tepat jumlah dan tepat waktu ;
- 5) Tugas Kepala Keuangan dan TI<sup>49</sup>
- a) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang Keuangan & TI Cabang kelas 1 Keuangan & TI, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidang Keuangan & TI Cabang Kelas 1 nya ;
  - b) Mengkomplikasikan rencana anggaran tiap Unit kerja, untuk memperoleh acuan dalam pengelolaan dana ;
  - c) Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan, agar kegiatan operasional cabang dapat berjalan lancar, efektif dan efisien ;
  - d) Mengkoordinasikan pencatatan transaksi keuangan, untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang lengkap dan akurat ;
  - e) Mengkoordinasikan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan Kantor Cabang, untuk memastikan kewajiban perpajakan Kantor Cabang, untuk memastikan kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai ketentuan ;
- f. Jaringan Kegiatan

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan

---

<sup>49</sup> Buku Pedoman dan Informasi BPJS Ketenagakerjaan (tahun 2015-2016)

bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tingkatan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya yang mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.

Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT. Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. Sebagai program publik, jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja dan mengatur jenis program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran. Dalam meningkatkan pelayanan jamsostek tak hentinya melakukan terobosan melalui sistem online guna menyederhanakan sistem layanan dan kecepatan pembayaran klaim hari tua (JHT).

g. Kinerja Kegiatan<sup>50</sup>

Suatu perusahaan memiliki visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan, butuh waktu untuk mencapai itu semua, begitu juga halnya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, perusahaan yang bergerak di bidang BUMN ini terus berupaya agar tujuan tersebut dapat terwujud. Segala sesuatunya harus disertai dengan kerja keras, disiplin, juga loyalitas dalam

---

<sup>50</sup> Buku Pedoman dan Informasi BPJS Ketenagakerjaan (tahun 2015-2016)

bekerja yang harus dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar agar tujuan tersebut dapat terwujud. Untuk mendorong tercapainya hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan juga tepat. Kinerja terkini yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar adalah penyelenggaraan jaminan sosial yang meliputi program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM).

### **B. *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar***

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data-data hasil wawancara, observasi maupun dari dokumen-dokumen yang diperoleh selama penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus dari sejak data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir.

BPJS Ketenagakerjaan cabang Makassar menyelenggarakan program jaminan sosial agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar :

“BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar bisa bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar. Bentuk kerja samanya berupa perjanjian kerja sama dan kami sudah membuat MoU dengan Pemerintah Kota Makassar seperti dengan BPMPTSP Kota Makassar dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dalam bentuk MoU dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Makassar dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial supaya dapat

---

<sup>51</sup> Rasidin, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 13 November 2016.

berjalan dengan efektif dan efisien. Hal serupa juga ditambahkan dengan pernyataan dari Kepala Bidang Umum BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

“Salah satu keunggulan dari BPJS Ketenagakerjaan ini sekarang bisa membuat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah. BPJS Ketenagakerjaan juga sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar dalam bentuk MoU terutama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan BPMPTSP Kota Makassar”.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar yang bertujuan untuk membantu BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyelenggarakan program jaminan sosial di Kota Makassar. Bentuk kerja sama ini juga akan membantu BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar agar semua perusahaan dan buruh di Kota Makassar dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, disebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa hubungan kerja sama dapat dilaksanakan dalam bidang pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat, kelembagaan, sumber daya manusia, pengelolaan sistem informasi, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, dan kerja sama lain yang disepakati para pihak. Dalam pasal 4 menyebutkan bahwa hubungan kerja sama ini dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama yang sudah disepakati bersama.

---

<sup>52</sup>Andi Muhammad Danial, AB, Kepala Bidang Umum BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 15 November 2016.

Program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 jenis program jaminan sosial yaitu program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, dan program jaminan pensiun. Keempat program ini sangat bermanfaat bagi buruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan menjamin keselamatannya saat bekerja nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

“BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program jaminan sosial yang diantaranya adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagai ganti jaminan pemeliharaan kesehatan. Dari 4 program itu ada 2 yang manfaatnya ditingkatkan untuk peserta, yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selain itu, dengan adanya program pensiun ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup buruh ke depannya nanti.”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan telah ditingkatkan manfaatnya bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga BPJS Ketenagakerjaan dapat menjamin kesejahteraan peserta. Disamping itu, adanya program jaminan pensiun akan menjamin kesejahteraan peserta ketika sudah pensiun atau tidak bekerja lagi ketika memasuki usia pensiun, sehingga masa depannya tetap terjamin dengan program jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut:

“BPJS Ketenagakerjaan telah mempunyai 4 program jaminan sosial seperti program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Selain itu, ada peningkatan manfaat pada program jaminan kecelakaan kerja dan kematian dan juga adanya jaminan pensiun diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh nantinya.”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Budiyanto, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 17 November 2016.

<sup>54</sup> Robi, Kepala Bidang Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 20 November 2016.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, BPJS Ketenagakerjaan menjalankan 4 program jaminan sosial yang diantaranya terdapat program jaminan pensiun sebagai ganti dari program jaminan pemeliharaan kesehatan yang sekarang sudah dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, adanya peningkatan manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan akan meningkatkan kesejahteraan dari peserta tersebut. Hal ini juga dikatakan oleh Ketua Bidang Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

“Setelah BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh maka BPJS Ketenagakerjaan memiliki program jaminan pensiun setelah sebelumnya ada program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Selain itu sekarang ada program beasiswa yang merupakan manfaat baru pada program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian memberikan beasiswa kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan dimana program beasiswa ini merupakan manfaat baru yang diterapkan di dalam program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian. Program beasiswa ini akan diberikan kepada peserta yang meninggal akibat kecelakaan kerja yang diberikan oleh program jaminan kecelakaan kerja dan meninggal akibat bukan kecelakaan kerja yang diberikan oleh program jaminan kematian. Hal yang sama juga ditambahkan oleh Kepala Bidang Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

“Dengan berubahnya PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan diikuti dengan ditambahnya manfaat yang didapatkan dari program jaminan sosial yang dijalankan khususnya pada program jaminan kecelakaan kerja dan juga program jaminan kematian. Di samping itu,

---

<sup>55</sup> Zulkarnain, Kepala Bidang Umum BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, wawancara, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 25 November 2016.



sekarang sudah ada program jaminan pensiun yang bertujuan untuk menjamin kehidupan peserta setelah pensiun bekerja nantinya.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada penambahan manfaat pada program jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian seperti beasiswa yang didapatkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan dan adanya program jaminan pensiun juga lebih menjamin kehidupan buruh di hari tua nanti bila sudah tidak bekerja lagi dan memasuki usia pensiun yaitu 56 tahun agar mempunyai tabungan hari tua yang bermanfaat bagi buruh nanti.

Hal ini berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menyebutkan bahwa, bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja akan menerima beasiswa pendidikan anak yang berjumlah Rp 12.000.000 untuk setiap peserta. Tidak ada batas dana bantuan yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu pengobatan peserta yang mengalami kecelakaan kerja yang artinya BPJS Ketenagakerjaan akan membiayai pengobatan peserta sampai peserta itu sembuh.

Selain itu, pada program jaminan kematian adanya peningkatan jumlah uang santunan sebesar Rp 16.200.000 yang sebelumnya Rp 14.200.000 yang akan dibayarkan sekaligus kepada keluarga buruh. Keluarga buruh juga akan mendapatkan santunan berkala selama 24 bulan di mana akan dibayarkan Rp 200.000 perbulannya dan akan sangat bermanfaat bagi keluarga buruh tersebut. Biaya pemakaman pun mengalami peningkatan jumlah pembayarannya menjadi Rp 3.000.000 dari yang sebelumnya Rp 2.000.000 dan akan mendapatkan juga beasiswa pendidikan anak sebanyak Rp 12.000.000 yang dibayarkan kepada setiap peserta.

---

<sup>56</sup> Candra, Kepala Bidang Umum BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 15 November 2016.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, buruh sudah memiliki tabungan yang bermanfaat apabila buruh sudah tidak bekerja lagi, meninggal atau di PHK oleh perusahaan yang berdampak pada kesejahteraannya nanti.

Di samping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, maka buruh dapat penghasilan dari jaminan pensiun ketika buruh sudah memasuki usia pensiun atau sudah memasuki usia 56 tahun dengan minimal 15 tahun masa kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan buruh beserta keluarganya yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ketika sudah pensiun dan tidak bekerja lagi.

Dalam bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan juga meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan agar pelayanan yang berjalan dapat berjalan maksimal dan peserta dapat merasakan kepuasan dari pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya dengan waktu pelayanan maksimal adalah 30 menit kepada setiap peserta, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

“Waktu pelayanan kepada peserta sekarang maksimal 30 menit yang berpedoman pada *service blue print* dan tidak boleh lebih dari itu agar peserta yang menerima pelayanan dari kami merasakan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. *Service blue print* ini juga bertujuan agar peserta yang telah antre tidak menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan.”<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa demi terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien maka waktu pelayanan dibatasi

---

<sup>57</sup> Budiyanto, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, wawancara, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 17 November 2016.

maksimal 30 menit agar dapat tercapainya kepuasan dari peserta yang menerima pelayanan dan juga agar peserta yang sudah antri dapat terlayani secepatnya. Dengan adanya peraturan *service blue print* ini diharapkan pelayanan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pelayanan yang diberikan bisa maksimal nantinya.

Selain itu, setiap akan memberikan pelayanan kepada peserta yang akan mengajukan klaim petugas BPJS Ketenagakerjaan akan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu untuk memberikan informasi terkait dokumen-dokumen apa saja yang perlu dilengkapi seperti KTP asli dan Kartu Keluarga (asli) kepada peserta agar peserta dapat mengetahui dokumen yang perlu dibawa pada saat ingin mengajukan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan peserta yang datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, sehingga informasi yang disampaikan dapat tersampaikan kepada peserta. Sosialisasi ini dilakukan sebelum melaksanakan pelayanan kepada peserta agar tidak terjadi kesalahan dan tidak lengkapnya dokumen yang dibawa oleh peserta ketika akan mengajukan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lancar dan tidak terhambat karena adanya dokumen yang tidak lengkap.

Selain itu, untuk proses pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah bisa dilakukan melalui proses *online* dengan mengunjungi *website* dari BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu proses pendaftaran akan berjalan dengan mudah karena tidak harus datang ke kantor cabang untuk daftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dalam proses mendaftar juga akan disediakan pilihan mendaftar sebagai personal dan sebagai perusahaan sehingga calon peserta dapat memilih sesuai dengan pekerjaannya.

Apabila mendaftar sebagai personal maka diwajibkan mengisi data-data pribadi seperti nomor KTP, nama lengkap, tanggal lahir dan juga nomor *handphone*. Dengan pendaftaran online melalui website BPJS Ketenagakerjaan ini dapat mempermudah proses pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan waktu dalam mendaftar akan lebih cepat daripada datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Adapun untuk pendaftaran sebagai perusahaan maka pengisian data awal hanya perlu mencantumkan email perusahaan saja yang diperlukan. Dengan adanya sistem online ini perusahaan bisa dengan mudah mendaftarkan perusahaannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga bisa membantu mempercepat pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Di dalam pelayanan *online* BPJS Ketenagakerjaan juga disediakan aplikasi pada *handphone* yang akan berfungsi untuk peserta jika ingin mengetahui saldo jaminan hari tuanya jadi peserta tidak perlu lagi untuk ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan agar dapat mengetahui saldo jaminan hari tuanya. Dengan begitu peserta jadi dimudahkan dalam mendapatkan informasi tentang saldo jaminan hari tuanya. Pada aplikasi tersebut terdapat beberapa pilihan yang dapat diakses peserta seperti layanan JHT yang berfungsi untuk mengetahui saldo JHT peserta dan juga simulasi JHT apabila peserta ingin mengetahui jumlah JHT ke depannya atau ingin mengetahui cara menghitung jumlah JHT tersebut. Pada pilihan informasi peserta dapat mengetahui informasi mengenai lokasi kantor cabang yang ada di seluruh Indonesia sehingga peserta dapat mengetahui lokasi kantor cabang terdekat dari peserta tersebut.

Peserta juga dapat mengetahui informasi tentang 4 program jaminan sosial yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga peserta dapat memahami program jaminan sosial yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan

sehingga memudahkan peserta apabila ingin memahami dan mengetahui tentang 4 program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan aplikasi ini hanya terdapat pada *software handphone* IOS, Android, dan juga Blackberry. Pada bidang pengawasan BPJS Ketenagakerjaan diberikan *strengths* untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara langsung kepada perusahaan atau buruh baik yang belum menjadi peserta maupun yang melanggar peraturan sehingga harus dikenakan sanksi hukum oleh BPJS Ketenagakerjaan. Petugas pengawasan dari BPJS Ketenagakerjaan dinamakan Penata Utama Pengawasan dan Pemeriksaan yang akan menjalankan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

“Untuk pengawasan BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki petugas sendiri yang akan melakukan pengawasan terhadap peserta yang melanggar aturan dan akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas pengawasan ini nantinya akan tetap berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan sekarang ditambah dengan Badan Perizinan juga untuk membantu pengawasan yang dilakukan kepada peserta.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, dalam melaksanakan proses pengawasan BPJS Ketenagakerjaan sudah dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung kepada perusahaan dan buruh.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Bidang Umum BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

“Adanya petugas pengawasan dan pemeriksaan ini membuat BPJS Ketenagakerjaan bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung kepada perusahaan atau buruh, tetapi petugas pengawasan tetap bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Perizinan juga untuk mempermudah pengawasan juga nantinya.”<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Rasidin, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 13 November 2016.

<sup>59</sup> Andi Muhammad Danial, AB, Kepala Bidang Umum BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 15 November 2016.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa petugas Ketua Bidang Uum BPJS Ketenagakerjaan tetap bekerja sama dan berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk mempermudah pengawasan dan juga pemberian sanksi kepada perusahaan atau buruh yang melanggar aturan atau yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pembentukan petugas pengawas dan pemeriksaan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial di mana petugas pengawas dan pemeriksaan ini dapat langsung menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung kepada perusahaan atau buruh yang tidak taat kepada peraturan yang berlaku.

Bentuk pemberian sanksi kepada perusahaan atau buruh yang melanggar peraturan berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemberian sanksi ini akan dilaksanakan sesuai hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan petugas pengawas BPJS Ketenagakerjaan setelah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan dan buruh tersebut. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

“Dalam memberikan sanksi BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan dari data perusahaan dan buruh yang kami miliki. Kalau perusahaan atau buruh ternyata melanggar peraturan maka akan segera diberikan sanksi oleh petugas pengawas kami seperti diberikan teguran tertulis kalau masih melanggar juga diberikan denda dan yang terakhir perusahaan dan buruh tidak mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah.”<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Rasidin, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 13 November 2016.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, sanksi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan dan buruh kalau melanggar peraturan berupa teguran tertulis, dikenakan denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan petugas pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua Bidang Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

“Petugas pengawas akan memberikan sanksi setelah melakukan pemeriksaan kepada perusahaan dan buruh berdasarkan data-data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan komunikasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengetahui perusahaan yang belum menjadi peserta. Kalau perusahaan dan buruh terbukti melanggar akan diberikan sanksi teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik.”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sanksi dapat diberikan kepada pengusaha dan juga buruh setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pengawas dan pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan. Apabila hasilnya menunjukkan bahwa pengusaha atau buruh terbukti melanggar peraturan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sanksi yang diterima pertama adalah teguran tertulis setelah itu berupa denda yang harus dibayarkan pengusaha atau buruh yang melanggar dan setelah itu tidak mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah.

Disamping itu, dengan adanya sanksi administratif seperti tidak mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah dapat memberikan efek jera bagi perusahaan atau buruh yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sehingga diharapkan mampu mengurangi pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

---

<sup>61</sup> Robi, Kepala Bidang Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 20 November 2016.



Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan manfaat yang besar baik bagi perusahaan maupun buruh dalam hal kesejahteraan hidupnya. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup buruh karena kedudukan buruh yang lemah dan bisa diberhentikan atau PHK oleh perusahaan serta ketika mengalami kecelakaan kerja saat bekerja akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan biaya pengobatannya. Hal ini seperti yang diungkapkan personalia Pelita Mahkota Hotelindo seperti berikut :

“Manfaatnya bagi buruh itu BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan kepada buruh kalau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan hari tua kalau tidak bekerja lagi nantinya. Selain itu, sekarang ditambah jaminan pensiun juga dan semoga ke depannya BPJS Ketenagakerjaan ini dapat bekerja lebih baik lagi dan program yang dijalankan dapat bermanfaat bagi pesertanya.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi buruh karena ketika buruh mengalami kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan saat bekerja atau kematian sudah ada yang menanggung biayanya, yaitu BPJS Ketenagakerjaan sehingga ikut meningkatkan kesejahteraan buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Personalia Bintang Retailindo sebagai berikut :

“Manfaatnya banyak seperti masa depan jadi lebih terjamin terutama buat hari tua nanti jadi lebih terjamin dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini dan semoga saja BPJS Ketenagakerjaan dapat terus meningkatkan kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada pesertanya.”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, masa depan buruh menjadi lebih terjamin karena adanya program jaminan sosial BPJS

---

<sup>62</sup>Irsan, Personalia Pelita Mahkota Hotelindo (Hotel), *wawancara*, di Pelita Raya, 25 November 2016.

<sup>63</sup>Ika, Personalia Bintang Retailindo (Jasa/Kesing HP), *wawancara*, di Boulevard, 27 November 2016.



Ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan BPJS Ketenagakerjaan memiliki program jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang akan menjamin kehidupan yang layak bagi buruh yang telah pensiun atau sudah memasuki usia pensiun nantinya. Dengan begitu akan menciptakan rasa aman dan tentram bagi buruh dalam menjalankan pekerjaannya karena ketika sudah pensiun nanti sudah memiliki tabungan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga diutarakan oleh personalia Nindya Karya sebagai berikut :

“Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan buruh tidak akan terkena biaya pengobatan ketika mengalami kecelakaan kerja dan mendapatkan santunan kematian untuk keluarga kami jika kami meninggal dunia. Selain itu, jaminan hari tua bermanfaat sebagai jaminan bagi buruh ketika sudah tidak bekerja atau di PHK untuk modal memulai usaha atau keperluan sehari-hari dan hari tua kami juga akan terjamin dengan adanya jaminan pensiun.”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, manfaat yang diberikan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sangat besar manfaatnya bagi buruh. Manfaatnya antara lain biaya pengobatan buruh ketika mengalami kecelakaan kerja sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, buruh mendapatkan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada keluarganya ketika buruh sudah meninggal dunia. Selain itu, buruh mendapatkan modal untuk memulai usaha atau untuk keperluan sehari-hari dari tabungan di program jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang layak bagi buruh dengan memberikan penghasilan setelah buruh memasuki usia pensiun atau sudah mencapai usia 56 tahun. Hal ini juga diungkapkan oleh Personalia Peternakan Cendrawasih sebagai berikut :

“Manfaatnya itu buruh mempunyai tabungan pada jaminan hari tua yang akan diambil ketika buruh tidak bekerja lagi atau mengalami PHK. Selain

---

<sup>64</sup> Roy, Personalia Nindya Karya (Kontraktor), *wawancara*, di Lamadukelleng, 30 November 2016.

itu, biaya pengobatan ketika buruh mengalami kecelakaan kerja sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat kepada buruh seperti program jaminan hari tua memberikan tabungan hari tua untuk buruh yang akan bermanfaat ketika buruh tidak bekerja lagi atau mengalami PHK. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung biaya pengobatan bagi buruh yang mengalami kecelakaan kerja, sehingga buruh tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Personalia Mugi sebagai berikut :

“Tentu banyak manfaatnya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini terutama untuk menjamin hari tua buruh karena buruh sudah mempunyai tabungan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan yang bisa diambil setelah masuk usia tua atau sudah tidak bekerja lagi. Semoga saja dengan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan ini program jaminan sosial dapat berjalan lancar dan sesuai pada tujuannya.”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa manfaat yang diberikan program jaminan sosial sangat banyak bagi buruh seperti masa depan jadi lebih terjamin dan buruh sudah memiliki tabungan untuk hari tuanya atau ketika sudah tidak bekerja lagi nantinya dan dengan adanya program jaminan pensiun yang baru diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh beserta keluarganya. Selain itu, bagi perusahaan manfaat yang dirasakan juga sangat besar terutama untuk memberikan rasa tenang bagi buruh yang bekerja di perusahaan itu dan biaya pengobatan jika terjadi kecelakaan kerja sudah menanggung sehingga mengurangi beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya pengobatan buruhnya, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Personalia Asuransi Buana Independent sebagai berikut :

---

<sup>65</sup>Nano, Personalia Peternakan Cendrawasih (Peternakan), *wawancara*, di Cendrawasih, 2 Desember 2016.

<sup>66</sup>Shely, Personalia Mugi (Jasa/Alat Musik), *wawancara*, di Urip Sumoharja, 5 Desember 2016.

“Manfaatnya besar bagi perusahaan terutama jika terjadi kecelakaan kerja sudah ada yang menanggung semua biaya pengobatannya, sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk menanggungnya. Disamping itu, menciptakan rasa tenang juga karena sudah ada jaminan hari tua yang menjamin hari tua buruh kalau sudah tidak bekerja lagi dan membuat semangat buruh untuk bekerja juga meningkat lagi.”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa, manfaat program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan adalah perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya pengobatan lagi ketika buruh yang bekerja di perusahaan itu mengalami kecelakaan kerja karena semua biaya sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kondisi peluang yang berkembang di masa mendatang. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Dengan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan menimbulkan berbagai macam peluang yang menguntungkan baik untuk BPJS Ketenagakerjaan maupun untuk perusahaan dan buruh. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang baru akan menimbulkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

“Banyak peluang yang didapat seperti cakupan kepesertaan lebih luas karena tidak hanya terbatas pada perusahaan dan tenaga kerja saja melainkan seluruh masyarakat Indonesia wajib menjadi peserta. Selain itu, dengan adanya kerja sama dengan pemerintah mampu meningkatkan lagi kualitas penyelenggaraan jaminan sosial dan adanya penambahan manfaat dalam program jaminan sosial akan berdampak pada kesejahteraan peserta nantinya.”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, peluang yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan kepesertaan tidak terbatas pada tenaga kerja saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia wajib menjadi peserta BPJS

---

<sup>67</sup>Eddy Mursal, Personalia Asuransi Buana Independent (Jasa/Asuransi), *wawancara*, di Gunung Latimojong, 7 Desember 2016.

<sup>68</sup> Rasidin, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 13 November 2016.

Ketenagakerjaan. Masyarakat Indonesia jadi memiliki jaminan sosial yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan memiliki tabungan hari tua yang akan bermanfaat ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak bekerja lagi.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan bisa menjalin kerja sama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang akan memberikan peluang untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial dengan adanya kerja sama dengan Pemerintah. Kerja sama ini juga bertujuan untuk memperbaiki dan mempermudah dalam melaksanakan penyelenggaraan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan agar berjalan lebih baik lagi. Hal ini juga ditambahkan oleh Kepala Bidang Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar:

“Peluang yang dimiliki itu seperti kepesertaan sudah mencakup seluruh masyarakat tidak hanya tenaga kerja dan perusahaan saja. Selain itu, pemerintah bisa ambil peran dalam penyelenggaraan program jaminan sosial dengan melakukan kerja sama. Produktivitas tenaga kerja juga akan meningkat karena sudah ada yang menjamin kesejahteraan dari tenaga kerja itu.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, dengan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan ini menimbulkan banyak peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial karena pesertanya tidak terbatas pada tenaga kerja dan perusahaan saja melainkan seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang akan menjadi jembatan menuju kesejahteraan yang lebih baik lagi dengan program jaminan sosialnya.

Selain itu, adanya penambahan manfaat pada program jaminan sosial seperti adanya program beasiswa untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang

---

<sup>69</sup>Robi, Kepala Bidang Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 20 November 2016.

sangat bermanfaat bagi kesejahteraan peserta beserta keluarganya dan BPJS Ketenagakerjaan bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah membuat peluang adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial karena BPJS Ketenagakerjaan bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang akan membantu kinerjanya melalui kerja sama yang sudah disepakati bersama. Pada sisi waktu pelayanan juga membuat pelayanan akan berjalan menjadi lebih baik lagi dengan adanya *service blue print* yang membuat pelayanan yang diberikan kepada peserta yang akan membuat klaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Waktu pelayanan maksimal 30 menit sehingga sudah menjadi acuan untuk BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan pelayanan yang cepat dan efektif kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, hal ini sebagaimana diungkapkan

Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut:

“Dengan adanya peraturan dalam *service blue print* membuat waktu pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif, sehingga peserta juga akan cepat dalam mengurus klaim yang dibuatnya dan pelayanan dapat berjalan dengan lancar.”<sup>70</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat terlihat bahwa tujuan adanya *service blue print* untuk memberikan waktu pelayanan yang cepat dan efektif kepada peserta sehingga pelayanan dapat diberikan dengan waktu yang singkat namun berjalan lancar dan efektif dalam mengurus klaim yang diajukan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar.

Bagi buruh dan perusahaan dengan adanya pembentukan BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraannya nanti karena berbagai manfaat yang diberikan program jaminan sosial ditambah dengan adanya jaminan pensiun membuat hari tua buruh akan terjamin dengan

---

<sup>70</sup> Budiyanto, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, wawancara, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 17 November 2016.

jaminan pensiun, hal ini sebagaimana dikatakan Personalia Pelita Mahkota Hotelindo sebagai berikut :

“Peluang ada untuk buruh yaitu untuk menjamin hari tua nanti dan ada yang membiayai pengobatan kalau terjadi kecelakaan saat kerja sedangkan bagi BPJS Ketenagakerjaan penyelenggaraan jaminan sosial dapat berjalan lebih baik lagi apabila dapat mengelolanya dengan baik.”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, BPJS Ketenagakerjaan memberikan peluang untuk menjamin hari tua buruh ketika sudah tidak bekerja lagi dan memasuki usia pensiun dengan tabungan hari tua yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, kesejahteraan buruh akan lebih terjamin karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengobatan ketika mengalami kecelakaan kerja, karena sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga ditambahkan oleh Personalia Bintang Retailindo:

“Hari tua kita jadi terjamin karena sudah ada tabungan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan jadi kalau nanti sudah tidak bekerja lagi bisa diambil buat keperluan sehari-hari juga jadi sudah ada jaminan buat hari tua nanti.”<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan sudah ada jaminan bagi buruh untuk hari tuanya atau ketika sudah tidak bekerja lagi di perusahaan karena adanya jaminan hari tua dan juga jaminan pensiun yang akan menjamin hari tua buruh nanti dan apabila buruh sudah tidak bekerja lagi sehingga menciptakan rasa tenang dalam buruh tentang hari tuanya nanti dan sudah memiliki biaya pengobatan dari BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi kecelakaan ketika bekerja sehingga berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Peluang yang tercipta bagi buruh dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini juga diungkapkan oleh personalia Nindya Karya sebagai berikut :

---

<sup>71</sup>Irsan, Personalia Pelita Mahkota Hotelindo (Hotel), *wawancara*, di Pelita Raya, 25 November 2016.

<sup>72</sup>Ika, Personalia Bintang Retailindo (Jasa/Kesing HP), *wawancara*, di Boulevard, 27 November 2016.

“Peluangnya bagi buruh seperti meningkatkan kesejahteraan kehidupan buruh dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kehidupan buruh akan tetap dijamin ketika sudah memasuki usia pensiun sehingga buruh tetap memiliki penghasilan apabila sudah pensiun atau tidak bekerja lagi.”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan menciptakan peluang yang sangat baik untuk kesejahteraan kehidupan buruh. Dalam segi ekonomi buruh tetap memiliki penghasilan ketika sudah tidak bekerja lagi dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena adanya program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan buruh. Hal ini juga diungkapkan oleh Personalia Peternakan Cendrawasih sebagai berikut :

“Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini membuat buruh memiliki jaminan dan perlindungan dari program jaminan sosialnya. Selain itu, buruh memiliki jaminan adanya penghasilan kalau sudah tidak bekerja lagi atau sudah pensiun nanti dari BPJS Ketenagakerjaan”.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan dan perlindungan kepada buruh ketika bekerja. Disamping itu, buruh mendapatkan jaminan untuk tetap mendapatkan penghasilan dari BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Personalia Mugi:

“Peluangnya itu seperti kesejahteraan buruh sudah ada yang menjamin dengan adanya jaminan sosial ini terutama untuk hari tua nanti atau sudah tidak bekerja lagi. Karena sudah ada jaminan sosial yang menjamin hari tua buruh.”<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Roy, Personalia Nindya Karya (Kontraktor), *wawancara*, di Lamadukelleng, 30 November 2016.

<sup>74</sup> Nano, Personalia Peternakan Cendrawasih (Peternakan), *wawancara*, di Cendrawasih, 2 Desember 2016.

<sup>75</sup> Shely, Personalia Mugi (Jasa/Alat Musik), *wawancara*, di Urip Sumoharja, 5 Desember 2016.



Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sebagai bentuk dari manfaat program jaminan sosial tersebut dan hari tua buruh sudah ada yang menjamin dengan adanya tabungan pada program jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagi perusahaan dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan juga menimbulkan peluang bagi kesejahteraan buruhnya dan untuk meningkatkan produktivitasnya buruhnya dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan akan menjadi lebih tenang dan menciptakan lingkungan yang kondusif di dalam perusahaan dengan mengikut sertakan perusahaan serta burunnya ke dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, hal ini sebagaimana yang diungkapkan Personalia Asuransi Buana Independent sebagai berikut:

“Peluangnya itu menciptakan ketenangan kepada buruh dalam bekerja karena sudah memiliki tabungan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga semangat kerjanya pun akan meningkat. Selain itu, pengeluaran perusahaan dapat berkurang apabila buruh mengalami kecelakaan kerja atau kematian karena sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan perusahaan dapat mengurangi beban biaya untuk membayar biaya pengobatan ketika buruh perusahaan tersebut mengalami kecelakaan kerja karena sudah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, dapat menciptakan ketenangan kepada buruh karena sudah dijamin oleh program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, sehingga akan meningkatkan produktivitas kerjanya di perusahaan tersebut. Hal ini juga diutarakan oleh Personalia Pelita Mahkota Hotelindo:

---

<sup>76</sup> Eddy Mursal, Personalia Asuransi Buana Independent (Jasa/Asuransi), *wawancara*, di Gunung Latimojong, 7 Desember 2016.



“Peluang yang dimiliki pasti ada untuk perusahaan seperti mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan perusahaan kalau buruh mengalami kecelakaan kerja atau kematian karena semua biaya sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan buruh juga akan memiliki tabungan hari tua kalau sudah tidak bekerja lagi sehingga semangat kerja meningkat.”<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa perusahaan akan mendapatkan manfaat yang besar dengan mengikuti program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan seperti BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung semua biaya kecelakaan kerja dan kematian yang dialami buruh sehingga perusahaan tidak akan keluar biaya sama sekali. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Personalia Bintang Retailindo:

“Banyak peluang yang tercipta bagi perusahaan seperti menanggulangi resiko kecelakaan kerja dan kematian yang dialami buruh karena seluruh biaya sudah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan dan buruh sudah memiliki tabungan dari jaminan hari tua yang dapat digunakan kalau sudah tidak bekerja lagi yang akan meningkatkan lagi produktivitas kerja buruh itu”.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa perusahaan tidak akan menanggung biaya pengobatan kecelakaan kerja dan kematian yang dialami buruh yang akan menguntungkan perusahaan karena berkurangnya beban biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif di perusahaan yang akan meningkatkan semangat bekerja dari buruh tersebut. Buruh juga akan memiliki tabungan di BPJS Ketenagakerjaan yang akan bermanfaat apabila sudah tidak bekerja lagi sehingga meningkatkan produktivitas kerja yang akan menguntungkan perusahaan itu.

Adanya berbagai peluang yang didapat dengan terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan maka BPJS Ketenagakerjaan

---

<sup>77</sup>Irsan, Personalia Pelita Mahkota Hotelindo (Hotel), *wawancara*, di Pelita Raya, 25 November 2016.

<sup>78</sup>Ika, Personalia Bintang Retailindo (Jasa/Kesing HP), *wawancara*, di Boulevard, 27 November 2016.

memanfaatkan berbagai peluang tersebut untuk menyelenggarakan program jaminan sosialnya, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

“Memanfaatkannya dengan mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar untuk proses pengawasan dan pemeriksaan kepada peserta maupun calon peserta dan dalam pemberian sanksi administratif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar sehingga diharapkan masyarakat Kota Tangerang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan seluruhnya nanti.”<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar memanfaatkan peluang yang ada dengan menjalin kerja dengan Pemerintah Kota Makassar. Kerja sama ini dilakukan dalam melaksanakan pengawasan kepada perusahaan dan buruh agar proses pengawasan dapat berjalan maksimal. Hal ini juga diutarakan oleh Kepala Bidang Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar :

“BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar untuk bisa membantu dalam hal pengawasan dan pemeriksaan kepada peserta dan yang belum menjadi peserta.”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam memanfaatkan peluangnya salah satu yang dilakukan yaitu melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar agar membantu penyelenggaraan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dalam hal pengawasan dan pemeriksaan kepada buruh dan perusahaan yang ada di Kota Makassar dan dalam memberikan sanksi administratif seperti tidak mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah terhadap peserta yang melanggar peraturan.

---

<sup>79</sup>Rasidin, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 13 November 2016.

<sup>80</sup>Robi, Kepala Bidang Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 20 November 2016.

Disamping itu, dalam melakukan pelayanan dengan adanya peraturan *service blue print* akan dimanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan baik lagi dalam melayani peserta yang datang ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, hal ini sebagaimana diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

“Manfaatnya pelayanan yang diterima peserta yang datang akan menjadi lebih cepat dan lebih baik lagi terutama dalam waktu pelayanan yang diberikan dan diharapkan nantinya mampu melayani seluruh peserta yang datang kesini.”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pelayanan dengan adanya *service blue print* yang mewajibkan waktu pelayanan maksimal 30 menit dapat membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan lebih baik lagi sehingga peserta yang datang ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar dapat terlayani seluruhnya.

### ***C. Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar***

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Ketenagakerjaan Cabang Makassar merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengurangi risiko ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya bernama PT. Jamsostek ( Persero ) menjadi BPJS ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS ketenagakerjaan Cabang Makassar melakukan kegiatan pelayanan publik dengan menggunakan prinsip-prinsip pelayanan agar pelaksanaan pelayanan berjalan dengan baik. Penyelenggaraan

---

<sup>81</sup> Budiyanto, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, wawancara, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 17 November 2016.

pelayanan berdasarkan *Blueprint* yaitu panduan dalam pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan mengetahui persepsi masyarakat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar Sebagai berikut, peneliti menggunakan indikator sebagai penilaian persepsi yaitu *Tangible, Reliability, Responsiveness, Confidence, dan Empaty*.

#### 1. *Tangible* ( Bukti fisik )

Adapun pelayanan yang dimaksud adalah tentang penampilan fisik, pegawai dan peralatan yang digunakan. Fasilitas yang dimaksud seperti keadaan kantor, sarana yang digunakan, dan keamanan pada badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) ketenagakerjaan.

##### a. Penilaian kondisi kantor dalam kebersihan dan kenyamanan

Kebersihan dan kenyamanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dari hasil penelitian menunjukkan sudah Baik. Kebersihan kantor seperti kebersihan kamar mandi yang selalu terjaga kebersihannya. Dan tersedianya fasilitas yang menunjang kenyamanan seperti AC, TV untuk menghilangkan bosan, disediakan air minum untuk memberikan kenyamanan dalam menunggu antrian dan keamanan bukan hanya melindungi transportasi tetapi juga perlindungan dari banyaknya pencaloan sehingga peserta merasakan kenyamanan dalam melakukan pelayanan.

##### b. Penilaian terhadap ruang tunggu

Ruang tunggu Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Makassar sudah baik namun kurang luas karena tidak bisa menampung jumlah peserta yang melakukan pelayanan dikarenakan kursi tempat menunggu sangat terbatas, tetapi masalah seperti itu hanya terjadi pada awal dan akhir bulan karena ramainya orang melakukan klaim. Keterbatasan

ruang tunggu dikarenakan kantor yang digunakan masih perlu perluasan dan pembenahan.

c. Penilaian sarana dan prasarana pelayanan.

Sarana dan prasarana yang digunakan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Makassar sudah baik. Seperti nomer antrian, alat pendingin ruangan dan air minum tersedia dengan baik. Dan terutama sarana melakukan pengecekan saldo yang dilakukan dengan cepat dengan tidak perlu mengikuti antrian.

Hasil wawancara dengan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Makassar dengan Bapak R. Syaifur Rachman :

“Menurut saya sudah baik, kantor tertata rapi dan toiletnya juga bersih, tempat menunggu antrian nyaman dengan disediakan air minum dan TV. Tetapi ruang tunggu kurang luas banyak peserta yang lain tidak mendapatkan kursi untuk menunggu antrian. Secara keseluruhan pelayanannya sudah memuaskan”.<sup>82</sup>

Selanjutnya menurut Bapak M. Saiful :

“Mengenai kebersihan dan kenyamanan sudah baik, sarana dan prasarannya juga bagus, dan penampilan pegawai juga bagus tetapi ruang tunggu pelayanan masih kurang, banyak juga yang tidak mendapatkan tempat duduk karena kursinya kurang banyak, secara keseluruhan sudah baik dan cukup memuaskan”.<sup>83</sup>

Selanjutnya menurut Bapak Tumaji :

“Kebersihan kantor BPJS Ketenagakerjaan disini cukup baik, disediakan air minum jadi pada waktu nunggu antrian yang lama tidak usah keluar untuk membeli minum, penampilan pegawai yang rapi dan cantik-cantik. Untuk pelayanan loket dan kursinya seharusnya perlu ditambah karena yang melakukan pelayanan lumayan banyak”.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> R. Syaifur Rachman, Peserta BPJS BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 1 Desember 2016.

<sup>83</sup> M. Saiful, Peserta BPJS BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 2 Desember 2016.

<sup>84</sup> Tumaji, Peserta BPJS BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 5 Desember 2016.

Hasil penelitian menyatakan narasumber memberikan penilaian yang baik dan cukup memuaskan dalam pelayanan. Pada Badan Penyelenggara Jaminan sosial ) Ketenagakerjaan kurang karena tempat duduk dalam pelayanan kurang dan terbatas dan banyak peserta yang tidak mendapatkan tempat duduk dan bahkan ada yang menunggu di luar kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar.

## 2. *Reliability*( Kehandalan )

Kehandalan yang dimaksud kemampuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam pelayanan yang mencerminkan keahlian pegawai dalam memberikan pelayanan secara cepat, kejelasan pegawai dalam memberikan informasi dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan efektif dan efisien. Kesigapan pegawai dalam melayani peserta. Untuk memperoleh kehandalan dalam melakukan pelayanan harus sering diadakan evaluasi kinerja agar kendala - kendala dalam pelayanan dapat diatasi.

### a. Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan

Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam melakukan pelayanan dengan standart pelayanan waktu yaitu dengan pelayanan pengajuan klaim 30 menit dari verifikasi awal dokumen peserta, Peserta menunggu verifikasi final dan terakhir peserta menerima pencairan klaim inilah sistem yang digunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Ketenagakerjaan saat ini. Sedangkan sistem yang akan digunakan pada pelayanan yang akan datang menggunakan sistem *Fast Track System* yaitu peserta menggunakan jalur online. Cara pelaksanaannya yaitu peserta mengisi formulir online, Menunggu verifikasi online, peserta datang ke kantor cabang di jalur *fast track* dan peserta menerima pencairan klaim. Penerapan sistem ini membutuhkan waktu 15 menit. Penerapan *fast track system* akan memberikan nilai positif pada

peserta BPJS bahwa proses berlangsung dengan cepat. Ketepatan waktu yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah baik dengan waktu dalam mencairkan dana klaim dengan cepat dengan ketentuan syarat-syarat pengambilan terpenuhi.

b. Kejelasan petugas dalam memberikan informasi

Pada waktu penelitian, peneliti melihat secara langsung adanya salah satu peserta yang menginginkan pencairan dana pada saat itu juga padahal syarat-syarat belum dilengkapi semua. Sehingga pegawai BPJS memberikan pengarahannya dengan ramah, tetapi tidak bisa diterima oleh peserta sehingga peserta marah. BPJS Ketenagakerjaan melakukan ketegasan karena tidak sesuai dengan prosedur.

c. Kedisiplinan waktu dalam memberikan pelayanan

Penilaian masyarakat tentang kedisiplinan waktu dalam melakukan pelayanan sudah baik dalam jam buka dan tutup, namun pada saat jam istirahat pegawai memberhentikan layanan dan membuat masyarakat menunggu lagi sampai jam istirahat selesai.

Hasil wawancara dengan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Makassar dengan Bapak R. Syaifur Rachman :

“Menurut saya waktu yang diberikan sudah baik dan lumayan cepat, jadi saya merasa terpuaskan akan pelayanan yang diberikan ”.<sup>85</sup>

Selanjutnya menurut Ibu Sinta Dewi Oktavia :

“Kecepatan dan kejelasan yang diberikan sudah baik, informasi dan keterangan yang disampaikan jelas. Kedisiplinannya baik namun pada saat istirahat kita harus menunggu lagi karena pegawainya istirahat bergantian”.<sup>86</sup>

Selanjutnya menurut Bapak Supriadi :

---

<sup>85</sup> R. Syaifur Rachman, Peserta BPJS BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, wawancara, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 1 Desember 2016.

<sup>86</sup> Sinta Dewi Oktavia, Peserta BPJS BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, wawancara, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 3 Desember 2016.

“ Pelayanan yang diberikan sangat baik, waktu untuk memberikan pelayanan yang cepat dan cara menerangkan juga jelas pada saat menanyakan kelengkapan data ”.<sup>87</sup>

Hasil penelitian pada variabel Reliability/ kehandalan sudah baik. Kehandalan pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam memberikan informasi, keterangan dan langkah-langkah melakukan pelayanan yang jelas sehingga pelayanan yang diberikan sudah efektif dan efisien dan peserta merasa puas akan pelayanan yang diberikan.

### 3. *Responsiveness* ( Daya tanggap )

Daya tanggap dalam artian kesediaan pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan respon atau solusi pelayanan dengan segera dan memuaskan.

#### a. Daya tanggap petugas dalam memberikan pelayanan

Respon yang diberikan pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah baik di mana pertama kali melakukan pelayanan peserta sudah mendapatkan respon dengan dilakukan verifikasi data dan cepat memberikan informasi yang dibutuhkan peserta.

#### b. Daya tanggap petugas dalam memberikan respon dan solusi

Dalam memberikan respon sudah baik namun pegawai pemberi informasi bertugas ganda yaitu memberikan informasi dan menjadi petugas keamanan. Sehingga peserta bergantian hanya untuk sekedar mencari informasi tentang kelengkapan data dan syarat-syarat yang diperlukan.

Pemberian solusi langsung diberikan dengan respon yang cepat, akurat dan tegas. Solusi cepat diberikan agar peserta tidak menunggu lama dan masalah tidak berlarut. Akurat adalah informasi yang diberikan sesuai dengan prosedur pelayanan. Tegas dalam artian melakukan pelayanan sesuai prosedur. Karena

---

<sup>87</sup> Supriadi, Peserta BPJS BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 4 Desember 2016.



terdapat peserta yang tidak menerima prosedur atau ketentuan. Terdapat peserta yang belum bisa melakukan pencairan dana karena belum waktunya dan peserta memaksa melakukan pencairan. Dalam hal ini pegawai dengan tegas menolak melakukan pelayanan yang menyalahi aturan.

Hasil wawancara dengan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Makassar dengan Bapak M. Saiful :

“ Kalau dilihat dalam memberikan informasi petugas sudah baik dan jelas seperti menjelaskan syarat-syarat kelengkapan untuk pengambilan JHT dan mengecek kelengkapan data untuk pengambilan JHT, dan lumayan puas akan pelayanannya”.<sup>88</sup>

Selanjutnya menurut Ibu Sinta Dewi Oktavia :

“Kesegeraan petugas dalam merespon peserta sudah baik, cepat dan jelas. Pada saat menanyakan alur pelayanan, kelengkapan data. Namun harus bergantian karena yang melakukan pengecekan juga lumayan banyak.”<sup>89</sup>

Selanjutnya menurut Bapak Tumaji :

“Daya tanggapnya sudah baik dalam memberikan informasi urutan pelayanan juga jelas dan pelan -pelan sehingga saya yang sudah sepuh tidak bingung dan puas akan pelayanannya”.<sup>90</sup>

Dari hasil penelitian variable Responsiveness/daya tanggap pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar menunjukkan hasil yang Baik.

#### 4. *Confidence* ( Keyakinan )

Pengetahuan pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terhadap penyampaian produk dan kesopanan pegawai dalam memberikan informasi. Seperti keramahan insan BPJS Ketenagakerjaan dalam menyambut peserta. Kejelasan keterangan yang diberikan oleh insan BPJS

---

<sup>88</sup> M. Saiful, Peserta BPJS BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 2 Desember 2016.

<sup>89</sup> Sinta Dewi Oktavia, Peserta BPJS BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 3 Desember 2016.

<sup>90</sup> Tumaji, Peserta BPJS BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 5 Desember 2016.

Ketenagakerjaan mengenai alur layanan selanjutnya. Tugas utama dalam meyakinkan peserta BPJS Ketenagakerjaan :

1. Memberi informasi terkait BPJS Ketenagakerjaan ( produk, kewajiban, dan hak peserta, dsb) dengan jelas agar peserta yakin akan yang disampaikan.
2. Memberi informasi terkait langkah pendaftaran selanjutnya
3. Proses penjelasan yang singkat, padat, dan jelas

Petugas yang *Proc edure-oriented* adalah sesuai dengan standart *blue print*:

1. Petugas perilaku sopan
2. Petugas ramah dalam melayani
3. Petugas dapat menjawab setiap pertanyaan dengan jelas
4. Petugas sigap dan cepat tanggap dalam melayani

Berikut penilaian:

1. Kemampuan petugas dalam meyakinkan peserta.

Kemampuan dapat dilihat dari lancarnya penyampaian informasi dalam memperkenalkan produk kepada calon peserta dan kemampuan menjawab setiap pertanyaan. Dalam hal ini kemampuan petugas sangat baik.

2. Pengetahuan yang dimiliki pegawai BPJS

Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pegawai sering dilakukan evaluasi kerja dan seminar-seminar untuk menambah pengetahuan mengenai produk/program pada BPJS Ketenagakerjaan.

Hasil wawancara dengan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Makassar dengan Bapak R. Syaifur Rachman :  
 “pengetahuan tentang penguasaan produk sudah baik dengan penyampaian juga lancar sehingga kita yakin dengan informasi yang diberikan”.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> R. Syaifur Rachman, Peserta BPJS BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, wawancara, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 1 Desember 2016.

Selanjutnya menurut Ibu Sinta Dewi Oktavia :

“pengetahuan produknya sudah baik dan jelas. Dan saya merasa puas dengan yang disampaikan”.<sup>92</sup>

Selanjutnya menurut Bapak Tumaji :

“Pegawai disini pengetahuannya sangat baik, dan kalau tidak yakin sudah saya ambil uang saya pada saat saya keluar kerja dulu tetapi saya biarkan agar berkembang dan saya ambil jika saya membutuhkan.”<sup>93</sup>

Hasil penelitian dari variabel *Confidence*/Keyakinan, menunjukkan kualitas pelayanan pada Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Makassar bisa baik. Dari indikator yang dinilai pengetahuan pegawai tentang program-program yang diberikan atau informasi lain sehingga dapat menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan untuk mengikuti program BPJS ketenagakerjaan.

## 5. Empaty (Empati)

Kemampuan Pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan seperti sikap peduli kepada peserta dengan menciptakan persepsi kesetaraan. Kepedulian terhadap peserta dapat dilakukan dengan salah satu cara menunjukan bahasa tubuh yang simpatik dan menggunakan tata bahasa yang menghormati.

### a. Kemampuan petugas dalam memahami keluhan

Dalam memahami keluhan petugas menjelaskan dengan ramah, sopan, dan mendengarkan apa yang dikeluhkan peserta dengan baik dan memberikan solusi yang membantu atau memberikan pengarahan yang baik.

### b. Kesabaran petugas dalam memberikan pelayanan.

---

<sup>92</sup> Sinta Dewi Oktavia, Peserta BPJS BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 3 Desember 2016.

<sup>93</sup> Tumaji, Peserta BPJS BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 5 Desember 2016.

Kemampuan petugas dalam kesabaran dalam melayani peserta sudah baik dengan bisa menempatkan posisi jika terdapat peserta yang kurang baik atau marah-marah petugas tetap menyikapi dengan sabar dan ramah.

c. Ketulusan petugas dalam memberikan pelayanan

Petugas dengan sopan dan ikhlas melayani setiap peserta dengan karakter yang berbeda dari setiap peserta. Dalam hal ini pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sudah Baik. Hasil wawancara dengan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Makassar dengan Bapak Supriadi :

“petugas dalam memberikan pelayanan dengan ramah, sopan dan penyampaian informasinya jelas, dan sabar dalam melayani peserta yang banyak karena terkadang ada pegawai yang sudah capek melayaninya tidak ramah lagi dengan muka yang tidak enak dipandang jadi saya puas akan pelayanan yang diberikan oleh pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar ini”.<sup>94</sup>

Selanjutnya menurut Ibu Sinta Dewi Oktavia :

“Pelayanan keseluruhan sudah baik cara melayani dengan sopan, sabar dan tetap semangat melayani peserta walaupun loket pelayanannya cuma sedikit sedangkan pesertanya yang banyak begini”.<sup>95</sup>

Selanjutnya menurut Bapak Tumaji :

“Petugasnya ramah-ramah dan dulu saya pernah lupa tidak membawa KTP saya diberi kemudahan untuk melakukan pengecekan saldo”.<sup>96</sup>

Hasil wawancara pada variabel *empathy/ empati* sudah baik, maka kualitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam menunjukkan rasa empati dan mendengar keluhan peserta dengan cara sabar dan tulus. Sehingga proses komunikasi dan pelayanan berjalan dengan baik dan lancar.

---

<sup>94</sup> Supriadi, Peserta BPJS BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 4 Desember 2016.

<sup>95</sup> Sinta Dewi Oktavia, Peserta BPJS BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 3 Desember 2016.

<sup>96</sup> Tumaji, Peserta BPJS BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *wawancara*, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, 5 Desember 2016.

#### ***D. Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar***

Telah terjadi pro kontra di kalangan ulama dalam melihat pelaksanaan BPJS di Kota Makassar. Hal itu terjadi karena di kalangan para ulama muncul persepsi yang berbeda terhadap BPJS tersebut.

##### **1. Pro terhadap BPJS**

Di antara mereka yang membolehkan BPJS datang dari organisasi massa (ormas) terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Lembaga *Bahs Al-Masail* (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Nasrullah Huda mengatakan bahwa para kiai, dan ulama di Jawa Tengah memutuskan bahwa BPJS diperbolehkan atau dengan kata lain halal. Di dalam BPJS terkandung unsur kebaikan, yaitu adanya prinsip saling membantu (terutama untuk yang sakit) yang sangat dianjurkan agama dan menjadi spirit dari BPJS, serta tidak ada unsur mengambil keuntungan sepihak.

Adanya klasifikasi kelas dalam sistem BPJS, NU Jawa Tengah menilai tidak masalah. Sebab, itu hanya teknis aturan berdasarkan pada kebijakan. Jika soal kebijakan, yang menjadi acuan adalah prinsip *maslahah* (kebaikan). Tentang adanya riba, NU Jawa Tengah juga menilai tidak ada unsur riba yang terkandung dalam BPJS. Terkait dengan buruknya pelayanan orang sakit yang mengikuti BPJS, hal tersebut tidak menghapuskan hukum halal BPJS. Harus dibedakan antara hukum dasar dengan praktek pelaksanaannya.<sup>97</sup>

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. Said Agil Siradj menyatakan dukungannya terhadap pemerintah dalam pembukaan muktamar di Jombang, dan memastikan penolakan haram ormas yang

---

<sup>97</sup>Rofiuddin, "NU bantah BPJS haram", <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/31/058688078/nu-bantah-bpjs-haram>, diakses 25 September 2016.

dipimpinnya terhadap fatwa MUI. MUI bukan lembaga yang memiliki otoritas mengharamkan dan menghalalkan sesuatu. Islam telah mengatur tata cara dan hukum. Fatwa tentang BPJS tersebut juga merupakan hasil *ijtima* Ulama Komisi Fatwa V tahun 2015 yang diselenggarakan di PonPes Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah. Fatwa ini sekaligus saran bagi pemerintah untuk segera membentuk BPJS syariah.<sup>98</sup>

Salah satu alasan mengapa Said Agil Siradj menyarankan MUI untuk mencabut fatwanya tersebut adalah bahwa salah satu alasan BPJS haram oleh MUI adalah karena mengandung riba. Di mana uang yang dikumpulkan dari BPJS tersebut disimpan oleh bank-bank yang tidak bernafaskan syariah. Apabila hal demikian alasannya, maka menurut Said semua uang orang di Indonesia adalah haram karena semua uang bermuara dan diurus oleh Bank Indonesia yang tidak Syariah. Percuma MUI berpendapat keras tentang halal-haram syariah apabila pusat keuangan Indonesia dikuasai oleh Bank Indonesia yang bukan syariah. Apabila hendak menghalalkan transaksi semua perbankan, MUI harus mengeluarkan fatwa Bank Indonesia haram. Itu baru penyelesaian. Setelah menetapkan BI haram dan mengubah menjadi BI Syariah, jika BI melakukan transaksi dengan bank di luar negeri, pilih yang syariah. Tanpa mengubah hukum NKRI menjadi hukum Syariah, maka semua transaksi perbankan menjadi halal.<sup>99</sup>

Selain Said Agil Siradj, pernyataan yang menyatakan bahwa BPJS halal datang dari Forum *baḥs al-masāil* pra muktamar ke-33 NU yang diselenggarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Ponpes Krapyak Yogyakarta pada

---

<sup>98</sup> Anonim, "Haram BPJS: NU Tegas Menolak, Muhammadiyah Menggantung", <http://www.indonesiamedia.com/haram-bpjs-nu-tegas-menolak-muhammadiyah-menggantung>, diakses tanggal 25 September 2016.

<sup>99</sup> Anonim, "Haram BPJS: NU Tegas Menolak, Muhammadiyah Menggantung", <http://www.indonesiamedia.com/haram-bpjs-nu-tegas-menolak-muhammadiyah-menggantung>, diakses tanggal 25 September 2016.

28 Maret 2015 lalu. Dalam *baḥs al-masā'il* tersebut telah disepakati bahwa program jaminan kesehatan nasional yang ditangani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bukan sesuatu yang haram. Forum itu menyimpulkan konsep jaminan nasional yang diselenggarakan BPJS tidak bermasalah menurut syariat Islam.<sup>100</sup>

## 2. Kontra terhadap BPJS

Di antara mereka yang menolak datang dari Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis), mereka beranggapan bahwa program tersebut tidak lain seperti asuransi konvensional pada umumnya meski bergerak dalam layanan sosial, karena memang perubahan nama dari Asuransi Kesehatan (ASKES) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sehingga masih mengandung *garār*, *maisīr*, *ruqbā* (pinjaman hingga batas kematian), *umrā* (pinjaman berdasarkan masa umur),<sup>101</sup> dan *jahālah*, terutama pada akad yang terjadi antara kedua belah pihak.<sup>102</sup>

Praktisi Ekonomi Islam, Muhaimin Iqbal, menyatakan bahwa keberadaan BPJS yang sifatnya wajib diikuti oleh semua warga negara tanpa terkecuali, terang-terangan akan melakukan kriminalisasi terhadap umat Islam yang menolaknya karena tidak ingin terjatuh dengan sistem riba. Artinya, jika sebelumnya ikut asuransi riba adalah pilihan, sekarang menjadi wajib. Sebab, yang menjadi pelaksana BPJS adalah PT. ASKES dan PT. Jamsostek, sehingga

---

<sup>100</sup> Anonim, "Kata MUI haram, ini hukum BPJS versi ulama NU", <http://www.kabarbisnis.com/read/2859454/kata-mui-haram--ini-hukum-bpjs-versi-ulama-nu>, diakses 25 September 2016.

<sup>101</sup> Ahmad Izzan & Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-ayat al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 37.

<sup>102</sup> Anonim, "Hukum BPJS Versi Ulama", [www.warna-ulama.com/2015/01/hukum-bpjs-versiulama.html](http://www.warna-ulama.com/2015/01/hukum-bpjs-versiulama.html), diakses 25 September 2016.



dapat dipastikan sistem pengelolaan dana jaminan sosial tersebut menganut sistem riba.<sup>103</sup>

Pernyataan yang lain pun diungkapkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Slamet Effendi Yusuf bahwa dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS disebutkan bahwa aset jaminan sosial harus disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank utama.<sup>104</sup> Bank-bank yang ditunjuk untuk menyimpan dana BPJS adalah institusi-institusi yang tidak memiliki nafas syariah. Faktanya, dana dikelola di bank konvensional dengan deposito jangka pendek dan ini yang menyebabkan adanya riba.<sup>105</sup>

Ditambahkan lagi oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) bahwa semua peserta BPJS baik miskin maupun kaya wajib membayar iuran dan akan didenda bila terjadi keterlambatan pembayaran. Dari iuran ini akan mendatangkan manfaat apabila sakit dan berkebutuhan terhadap penanganan medis. Namun, apabila semua itu tidak terjadi maka uang ini hangus dan akan digunakan oleh orang lain yang membutuhkan penanganan medis.<sup>106</sup>

Apabila dikatakan bahwa uang yang hangus tersebut merupakan akad gotong royong atau *ta'āwun* kepada pihak yang membutuhkannya, maka Dewan Hisbah menilai di dalamnya ada ketidakjelasan (*jahālah*) dikarenakan akad gotong royong atas uang tertentu dengan nama iuran/premi merupakan ketentuan yang mengikat dan memaksa. Terutama ditambah denda yang wajib dibayar apabila terjadi keterlambatan yang semakin memberatkan orang miskin atau yang preminya tidak ditanggung oleh negara. Jika memang gotong royong, belum

---

<sup>103</sup> Anonim, "Hukum BPJS Versi Ulama", [www.warna-ulama.com/2015/01/hukum-bpjs-versiulama.html](http://www.warna-ulama.com/2015/01/hukum-bpjs-versiulama.html), diakses 25 September 2016.

<sup>104</sup> Pasal 40 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS.

<sup>105</sup> Pasal 40 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS.

<sup>106</sup> Pasal 40 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS.



terjadi orang kaya membantu orang miskin secara teratur dan terencana (kalkulatif). Yang terjadi semua berdasarkan spekulatif (untung-untungan/*maisir*/perjudian). Bahkan pada praktiknya orang kaya dibantu dengan iuran uang orang miskin, ini tentu bukan gotong royong, tetapi *maisir*. Sebab, orang-orang kaya ikut BPJS bukan sebagai orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi dengan niat mendapatkan keuntungan. Jika faktanya ia terbantu oleh uang fakir miskin, jelas ini bukan *ta'awun*, akan tetapi pemerasan.<sup>107</sup>

Di samping itu, Dewan Hisbah menilai pengalihan tanggung jawab negara dalam pelayanan publik kepada rakyat adalah *garār* (penipuan). Dana yang terkumpul di BPJS juga faktanya diinvestasikan di lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, sehingga unsur riba masih melekat erat di dalamnya. Maka dari itu, Dewan Hisbah menegaskan bahwa BPJS pada praktiknya belum benar-benar bersih dari unsur-unsur *maisir*, *ruqbā*, *jahālah*, dan *garār* yang dilarang oleh Rasulullah dan tidak selaras dengan ruh *ta'āwanū'alal birri wa at-taqwā* (saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa).<sup>108</sup>

Sementara pernyataan lain disampaikan oleh wakil ketua umum MUI, KH. Makruf Amin, MUI mengharamkan BPJS Ketenagakerjaan karena tidak beres secara prosedural dan substansial. Sesuai undang-undang, di antaranya, suatu produk bisa dianggap bersistem syariah jika mendapatkan opini kesyariahan dari Dewan Syariah Nasional (DSN). BPJS tidak mengajukan untuk meminta fatwa atau opini kesyariahan ke Dewan Syariah Nasional. Sedangkan secara substansial, ada beberapa permasalahan terkait akadnya yang bertentangan dengan syariah. Tidak jelas uang yang dikumpulkan dari siapa, dan

---

<sup>107</sup>Pasal 40 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS.

<sup>108</sup> *Anonim*, "Hukum BPJS Versi Ulama", [www.warna-ulama.com/2015/01/hukum-bpjs-versiulama.html](http://www.warna-ulama.com/2015/01/hukum-bpjs-versiulama.html), diakses 25 September 2016.

apabila rugi siapa yang menanggung. Dan yang terakhir, uang yang dikumpulkan itu didepositkan di bank konvensional, sehingga mengandung riba.<sup>109</sup>

Dengan adanya tanggapan dari masing-masing pihak tentang adanya BPJS, wawancara mendalam terkait keabsahan dari BPJS Cabang Makassar. Mengingat setiap orang dalam kehidupan kemungkinan akan mengalami kerugian (resiko) baik terhadap dirinya, keluarga, dan harta miliknya. Kemungkinan bahwa dia akan sakit, kecelakaan, bertambah tua sehingga tak mampu lagi untuk bekerja, bahkan meninggal akan selalu ada entah kapan saatnya tiba. Kemungkinan risiko tersebut dapat diperkecil, tetapi tidak dapat dihilangkan sama sekali.

Dengan adanya kontroversi eksistensi BPJS Ketenagakerjaan, di Cabang Makassar ulama menilai berdasarkan keputusan Fatwa Pusat, umumnya mereka melihat dari segi unsur tolong-menolong (ta'awun) di dalamnya, Konsep ta'awun yang diberlakukan BPJS, menurut AG. Dr. H. Sanusi Baco, Lc. Bahwa BPJS masuk dalam bab jihad seperti disebutkan *Fathul Mu'in* yakni *daf'u dhararin ma'shumin*. Sehingga di sini pemerintah diposisikan sebagai administrator bagi orang kaya untuk membantu mereka yang lemah. Hal tersebut merupakan syi'ar masyarakat Islami dan asas dalam kehidupan ekonomi. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat jauh lebih besar daripada *mudharatnya*. Konsep ta'awun (tolong menolong) bisa diartikan dengan bertemunya setiap individu yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda, untuk bekerjasama saling membahu mencapai tujuan yang ingin diwujudkan bersama. Sebuah sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, sistem sosial yang dibentuk untuk menyebarkan ilmu di antara orang yang bergabung, dan masyarakat pada

---

<sup>109</sup> *Anonim*, "Muktamar NU Juga Bahas Fatwa MUI BPJS Kesehatan", *news.liputan6.com*, 25 September 2016.

umumnya, saling mempersaudarakan satu sama lainnya dan berkorban demi kepentingan bersama.<sup>110</sup>

Konsep *ta'awun* dijelaskan dalam QS al-Mā'idah/5: 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Terjemahnya:

...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...<sup>111</sup>

Makna *al-birru* (الْبِرُّ) dan *at-taqwa* (التَّقْوَى) dua kata ini, memiliki hubungan yang sangat erat. Karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya. Secara sederhana, *al-birru* (الْبِرُّ) bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh *syariat*. *Al-Birru* adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Lawan katanya *al-itsmu* (dosa) yang maknanya adalah satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya. Allah swt mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.<sup>112</sup>

*Ta'awun* merupakan konsep dasar yang dijadikan asas untuk mengaplikasikan teori Islam atas harta, tanpa adanya *ta'awun*, maka teori

<sup>110</sup>Sanusi Baco, Ketua MUI Sul-Sel, *wawancara*, di Kelapa Tiga, 2 Januari 2017.

<sup>111</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: SYGMA, 2010), h. 106.

<sup>112</sup>Abu 'AbduAllah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn farh al-Anshari al-Khazraji Syamsy al-Din, *Al-Jâmi' li Ahkâmil-Qur'an*, tahqîq: Abdur-Razzaq al-Mahdi, (Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Bairut, 1421H ), h. 45

tersebut tidak dapat diwujudkan. Dan tanpa adanya pemahaman yang benar tentang makna *ta'awun* dan keimanan yang mendalam, maka kehidupan masyarakat Islam tidak akan pernah terbangun, dan konsep ekonominya hanya sebatas retorika. Masyarakat muslim mempunyai syi'ar, firman Allah dalam QS al-Zukhruf/43: 32

وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ<sup>١١٣</sup>

Terjemahnya:

...Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>113</sup>

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? yang dimaksud dengan rahmat adalah kenabian (Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia) maka Kami jadikan sebagian dari mereka kaya dan sebagian lainnya miskin (dan Kami telah meninggikan sebagian mereka) dengan diberi kekayaan (atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan) golongan orang-orang yang berkecukupan (sebagian yang lain) atas golongan orang-orang yang miskin (sebagai pekerja) maksudnya, pekerja berupah; huruf Ya di sini menunjukkan makna Nasab, dan menurut suatu qiraat lafal Sukhriyyan dibaca Sikhriyyan yaitu dengan dikasrahkan huruf Sin-nya (Dan rahmat Rabbmu) yakni surga Rabbmu (lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan) di dunia.<sup>114</sup>

Dalam arti, harta kekayaan bukanlah menjadi tujuan hidup, harta berfungsi sebagai kehidupan dan mempunyai tugas-tugas sosial yang cukup urgen, manusia sama dihadapan Allah, dan yang membedakan adalah kadar takwa yang akan menyampaikan seorang hamba pada rahmat Allah.<sup>115</sup>

<sup>113</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 491.

<sup>114</sup>Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahali dan Jalajuddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asuyuti, *Tafsir Jalalain* (al-Haramain Jaya Indonesia, 2008), h. 155.

<sup>115</sup>Samsuri, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, di Pettarani, 2 Januari 2017.

Seorang muslim tidak meninggalkan muslim lainnya ketika ia disakiti. Bahkan harus melindunginya, menghibur dan membantunya jangan sampai menghina dan mengejeknya. Seharusnya ia berbuat baik kepada mereka tanpa membedakan yang saleh dan yang jahat. Dia harus bergaul dengan orang miskin dan anak yatim. Dia harus hormat terhadap mereka dan berlapang dada kalau mereka bertindak kasar kepadanya. Jika mereka marah kita tidak boleh memutuskan hubungan. Kewajiban seorang muslim untuk menyenangkan orang lain dan memenuhi keperluan mereka, ini adalah amal yang besar nilai moralnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَذَكَّرُونَ بَيِّنَاتٍ مِنْهُ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ فِي عَمَلِهِ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. (رواه مسلم)<sup>116</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah saw bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya (H.R. Muslim).

Hakekat persaudaraan dalam Islam adalah saling memperhatikan, dalam artian saling memahami, saling mengerti, saling membantu, dan membela

---

<sup>116</sup> Abdullah Khaidhir, *Hadits Arba'in Nawawiyah* (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2010), h. 104.

terhadap sesama sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw., di atas yang disabdakan karena adanya sahabat yang membantu dan membela saudaranya yang diserang atau dianiaya oleh orang lain. Saling memperhatikan boleh jadi karena didorong oleh adanya persamaan antar satu dengan yang lainnya.<sup>117</sup>

Nabi saw., menekankan pentingnya membangun persaudaraan Islam dalam batasan-batasan praktis dalam bentuk saling peduli dan tolong menolong. Sebagai contoh Beliau bersabda “

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ...وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ... (رواه مسلم) <sup>١١٨</sup>

Artinya:

...Allah swt menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya...(H.R. Muslim).

Seorang muslim yang mengharapkan belas kasih khusus dari Allah swt jika ia tidak memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan muslim lainnya. Sebagai akibatnya persaudaraan kaum muslim tidak saja merupakan aspek teoritis ideologi Islam tapi telah terbukti dalam praktek aktual pada kaum muslim terdahulu ketika mereka menyebarkan Islam ke penjuru dunia.

Dalam pandangan ormas Muhammadiyah, salah seorang pengurus Muhammadiyah berpendapat tentang BPJS bahwa persoalan BPJS juga menjadi poin penting dalam muktamar Muhammadiyah. Sebab, mengklaim sesuatu hal yang belum jelas hukumnya harus dilakukan secara bersama-sama baik dari ormas Islam, pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat.<sup>119</sup> Dari organisasi Wahdah Islamiyah, memaparkan bahwa program seperti ini, tidak terlepas dari

<sup>117</sup>Saenal Abidin, Pemuka Agama, *wawancara*, di Pettarani, 2 Januari 2017.

<sup>118</sup>Abdullah Khaidhir, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, h. 104.

<sup>119</sup>Patta Rahim, Pengurus Muhammadiyah, *wawancara*, di Masjid Muhammadiyah Pettarani II, 3 Februari 2017

adanya unsur tolong menolong, yang kaya membantu yang miskin, dan saya juga sempat bertanya kepada Asy-Syaikh Muhammad Ghalib tentang hal ini, dan beliau kurang lebih memberi jawaban yang sama.<sup>120</sup>

Secara garis besarnya ulama dan ormas yang pro terhadap BPJS dikarenakan BPJS dalam menyelenggarakan programnya berlandaskan kepada prinsip tolong menolong, sedangkan ulama yang kontra terhadap BPJS lebih menekankan kepada aspek *garār*, *maisīr*, *ruqbā* (pinjaman hingga batas kematian), *‘umrā* (pinjaman berdasarkan masa umur), dan *jahālah*, terutama pada akad yang terjadi antara kedua belah pihak.

Dari polemik tentang eksistensi hukum BPJS, peneliti pro terhadap BPJS karena pada dasarnya program yang dijalankan dirasakan lebih banyak manfaatnya dibandingkan *mufradatnya*. Melalui konsep tolong menolong, merupakan kesempatan untuk membantu yang tidak mampu. Dengan adanya jaminan sosial yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan mampu memberikan kehidupan yang layak kepada kelangsungan hidup masyarakat dan buruh. Pencapaian seperti inilah yang akan mengantarkan kepada *Kemaslahatan*.

Cerminan tolong menolong juga mengantarkan manusia untuk dapat lebih mempererat tali persaudaraan, menciptakan hidup yang tentram dan harmonis dan menumbuhkan rasa gotong-royong antar sesama. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan khususnya Cabang Makassar dengan konsep jaminan sosial berlandaskan tolong menolong jelas mengandung *masalah* daripada *mafsadah*. Selain dari ayat dan hadits di atas, dipertegas pula dalam kaidah fiqh yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

---

<sup>120</sup>Qasim, Pengurus Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, di Wahdah Abdullah Deng Sirua, 3 Februari 2017.

Artinya:

Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Berdasarkan hal tersebut eksistensi dari pelaksanaan BPJS sebagai bagian dari tolong-menolong sebab Seorang muslim tidak meninggalkan muslim lainnya ketika ia disakiti. Bahkan harus melindunginya, menghibur dan membantunya jangan sampai menghina dan mengejeknya. Oleh karena itu, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat utamanya buruh lebih jelas, maka arah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar menjadi contoh dalam pemberian jaminan sosial.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraannya menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar, adanya *e-service* yang bisa dimanfaatkan oleh peserta, adanya *service blue print* untuk mempercepat pelayanan, adanya penambahan manfaat pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian serta ditambah program jaminan pensiun, adanya sosialisasi yang rutin dilakukan kepada peserta sebelum memulai pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta menambah kenyamanan peserta yang datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Cakupan kepesertaan tidak hanya tenaga kerja dan perusahaan saja, dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial dan dapat meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat pekerja/buruh.
2. Persepsi masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar dilihat dari indikator sebagai penilaian persepsi yaitu *Tangible* (tempat duduk dalam pelayanan kurang dan terbatas dan banyak peserta yang tidak mendapatkan tempat duduk dan bahkan ada yang menunggu di luar kantor), *Reliability* (dalam memberikan informasi, keterangan dan langkah-langkah melakukan pelayanan yang jelas sehingga pelayanan yang diberikan sudah efektif dan efisien dan peserta merasa puas akan pelayanan yang diberikan), *Responsiveness* (pada dasarnya respon pelayanan yang diberikan sangat baik), *Confidence* (pengetahuan pegawai tentang program-program yang diberikan atau informasi lain sehingga

dapat menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan untuk mengikuti program BPJS ketenagakerjaan), *dan Empaty* (dalam menunjukan rasa empati dan mendengar keluhan peserta dengan cara sabar dan tulus. Sehingga proses komunikasi dan pelayanan berjalan dengan baik dan lancar).

3. Pandangan Hukum Islam akan keberadaan BPJS Ketenagakerjaan terdapat pro dan kontra khususnya ormas-ormas Islam. Terkhusus pada BPJS Cabang Makassar, persoalan hukum BPJS Ketenagakerjaan masih menjadi perbincangan, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada mereka dan yang menjadi sorotan utama adalah BPJS Kesehatan. Akan tetapi dilihat dari praktiknya justru mengandung *kemaslahatan* karena dilandasi semangat tolong menolong. BPJS Ketenagakerjaan dijadikan media sebagai implikasi *maqasid al-syariah* dalam menjaga agama (*hifzh al-din*) sebagai “perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan tujuan menjaga akal (*hifzh al-‘aql*) diinterpretasikan sebagai “perlindungan terhadap kebebasan berpikir.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mencoba memaparkan implikasi penelitiannya agar dapat membantu pihak badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dalam pelaksanaan ke depan:

1. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan lebih ditingkatkan lagi terutama aspek tolong menolong sehingga dirasakan maslahahnya
2. Memberikan peluang yang lebih besar kepada perusahaan dalam tahap musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang kebijakan yang menyangkut penyelenggaraan jaminan sosial.

3. Meningkatkan pemeriksaan serta pengawasan yang lebih ketat kepada perusahaan yang belum menjadi peserta maupun yang belum membayar iuran bulanan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. "Haram BPJS: NU Tegas Menolak, Muhammadiyah Menggantung", <http://www.indonesiamedia.com/haram-bpjs-nu-tegas-menolak-muhammadiyah-menggantung>, diakses tanggal 25 September 2016.
- , "Hukum BPJS Versi Ulama", [www.warna-ulama.com/2015/01/hukum-bpjs-versiulama.html](http://www.warna-ulama.com/2015/01/hukum-bpjs-versiulama.html), diakses 25 September 2016.
- , "Kata MUI haram, ini hukum BPJS versi ulama NU", <http://www.kabarbisnis.com/read/2859454/kata-mui-haram--ini-hukum-bpjs-versi-ulama-nu>, diakses 25 September 2016.
- , "Muktamar NU Juga Bahas Fatwa MUI BPJS Kesehatan", [news.liputan6.com](http://news.liputan6.com), 25 September 2016.
- Alim, Muhammad. *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asikin, Zainal et.al. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Mataram: Rajawali Pers, 2007.
- Brotowidjoyo, Mukayat D. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karangan Ilmiah*. Yogyakarta; Liberty, 1991.
- Buku Pedoman dan Informasi BPJS Ketenagakerjaan (tahun 2015-2016).
- Al-Buthi, Muhammad Said Romadlon. *Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah*. Beirut: Dar al Muttahidah, 1992.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasinya*, cet. Pertama. Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1989.
- Gilbert, Neil. *Transformation of the Welfare State : The Silent Surrender of Public Responsibility*. New York: Oxford University Press, 2002.
- [Http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/268](http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/268), diakses tanggal 19 September 2016 pukul 17.43.
- [Https://rumaysho.com/9771-bolehkah-jadi-anggota-bpjs.html](https://rumaysho.com/9771-bolehkah-jadi-anggota-bpjs.html) diakses tanggal 25 November 2016.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Cet. Ke-9; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Izzan, Ahmad & Syahri Tanjung. *Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-ayat al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: SYGMA, 2010.
- Kartasapoetra, G dan Rience Indraningsih. *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*. Bandung: Armico Bandung, 1982.

- Khaidhir, Abdullah. *Hadits Arba'in Nawawiyah*. Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2010.
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Kota Makassar dalam Angka 2016, Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Katalog*.
- Lalu, Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Cet. Ke-9; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mahali, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad dan Jalajuddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asuyuti. *Tafsir Jalalain*. Al-Haramain Jaya Indonesia, 2008.
- Maliki, Elly Warti. Antara Maqashid Syariah dan Karakter Umat. Retrived at Mei 2011 from <http://www.hidayatullah.com/>
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Republik Indonesia. *UUD '45 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Karya Simpati Mandiri, t.th.
- Rofiuddin, "NUbantahBPJSharam", <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/31/058688078/nu-bantah-bpjs-haram>, diakses 25 September 2016.
- Sendjun, Manulang. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta, 1990.
- Soedjono, Wiwiho. *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bina Aksara, 2000.
- Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1985.
- Sulastomo. *Mekanisme Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, cet. Pertama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Usamah, Abu Naqie. Maqashid Syariah. Retrived at May 2011 from <http://pesantren.or.id.42303.masterweb.net/>.
- Zamroni, Muhammad. "Ilhaq Konsep Bpjs Dengan *Al-Ta'min* Perspektif *Qiyas*", Vol. 14, No. 2, (Desember 2015).
- az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-fiqih al-Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**La Dalle**, lahir pada tanggal 19 Agustus 1971 di Timoren Panua (Kabupaten Sidrap). Berkat kasih sayang kedua insan yaitu Ayahanda alm. Sahede dan Ibunda Hj. Baba, suami dari Dra. Hj. Asiah ini telah dianugerahi 2 (dua) orang anak; Wadi'ah Qadasiah dan Muh. Nashwan Qadasiah. Saat ini, penulis sebagai mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Hukum Syariah.

Penulis pernah mengenyam pendidikan di SDN 2 Timoren Panua tamat tahun 1983, Pondok Pesantren Darul Istiqomah Maccopa Maros tamat tahun 1986, SMA Muhammadiyah 08 Makassar tamat tahun 1990, S1 Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar tamat tahun 1996. Penulis juga aktif di organisasi dan dunia kerja, antara lain pengurus MAPALA IAIN Alauddin 1994, pengurus Sanggar Seni IAIN Alauddin 1994, pengurus UKM Makassar sampai sekarang, pengurus UKM PasTer Makassar sampai sekarang dan pemilik UD. JAYA MURNI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R





## DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN



Rasidin

Kepala Cabang Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Makassar



Andi Muhammad Danial. AB

KABID Umum Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Makassar





Budiyanto

KABID Pelayanan Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Makassar



Robi

KABID Keuangan Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Makassar



Zulkarnain

KABID Penerima Upah (BPU) Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Makassar



Candra

KABID Bukan Penerima Upah (BPU) Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Makassar



Logo BPJS Ketenagakerjaan



Struktur BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar

### Pedoman Wawancara

#### A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

#### B. Daftar pertanyaan

1. Bagaimanakah profil perusahaan ini (waktu pendirian, jumlah karyawan, struktur organisasi, dll)?
2. Bagaimana menurut anda tentang kualitas pelayanan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar ?
3. Bagaimana pendapat anda tentang adanya keluhan peserta jika terjadi masalah dalam pelayanan?
4. Bagaimana cara meningkatkan kinerja pegawai BPJS Ketenagakerjaan ?
5. Bagaimana penilaian anda tentang kemampuan petugas memahami keluhan dan menunjukkan kepercayaan?
6. Bagaimana penilaian anda tentang kemampuan petugas dalam merespon keluhan dan memberikan solusinya?
7. Bagaimana penilaian anda tentang ketepatan waktu dan kejelasan dalam memberikan pelayanan?
8. Bagaimanakah perlindungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja yang mendapat kecelakaan dan atau menderita penyakit akibat kerja?
9. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan pasal 81 s/d 83 UU No 13 Tahun 2003 ?
10. Apakah Saudara mengetahui hak-hak yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan ?



11. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap BPJS Ketenagakerjaan?
12. Apakah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar telah sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang?
13. Bagaimana reaksi masyarakat Makassar terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan?



**PERMOHONAN PENANDATANGANAN  
IJAZAH S2 (MAGISTER)  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

---

1. Nama : La Dalle .....
2. NIM : 80201214016 .....
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki .....
4. Tempat Tgl. Lahir : Timoren Panua, 19 Agustus 1971 .....
5. Pekerjaan : Mahasiswa/Wiraswasta .....
6. Alamat : Jl. A.P. Pettarani II Lr. 4 No. 5 .....
7. Kelurahan/Desa\* : Tamamaung .....
8. Kecamatan : Panakukang .....
9. Kota/Kabupaten\* : Makassar .....
10. Provinsi : Sulawesi Selatan .....
11. Tanggal/Tahun Masuk : .....
12. Tanggal/Tahun Lulus : .....
13. Konsentrasi : Syariah Hukum Islam .....
14. IPK : 3,86 .....
15. No. Urut Alumni : .....
16. Tanggal Pengajuan Penandatanganan Ijazah : .....
17. No. Seri Ijazah : **Un.06/PI/PP.01.1/ /2016**
18. No. Reg. PS.3 : .....
19. Judul Tesis : PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MAKASSAR  
(Suatu Tinjauan Terhadap Hukum Islam) .....

Mengetahui  
An. Direktur  
Asisten Direktur I

**Prof. Dr. H. Achmad Abu Bakar, M.Ag.**  
NIP. 19700701 199403 1 001

Samata, 06 Maret 2016

Yang Bersangkutan

Foto  
3 × 4

**La Dalle**

Catatan :

\* Coret Salah Satu